

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)

1. Sejarah Berdirinya Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, “Berbeda namun tetap satu” menjunjung tinggi perbedaan. Prinsip ini, yang diundangkan pada masa kemerdekaan tahun 1945, memungkinkan masyarakat Indonesia juga memiliki identitas daerah dan etnis, sebagai suku bangsa, untuk berbicara dalam bahasa daerah dan nasional. Mereka adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia. Namun keberagaman tersebut hanya terbatas pada kelompok etnis yang mempunyai klaim teritorial di nusantara. Sebagai kelompok migran, warga negara Tiongkok tidak memiliki klaim atas suatu wilayah tertentu, meskipun mereka terkonsentrasi di wilayah tertentu. Mereka tersebar di seluruh pulau dan berbicara dalam bahasa lokal, namun masih dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai kelompok yang hanya setengah hati mengklaim kepemilikan nasional.

Bukan hanya itu, jika kita melihat kebelakang, banyak sekali contoh kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa. Konflik yang terjadi pada tahun 1998 memakan banyak korban, terutama masyarakat keturunan Tionghoa. Mereka harus menghadapi kekerasan dari penduduk asli di negara tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Konflik ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa. Seperti bentrokan suku dan etnis non-pri yang terjadi di Bagan Siapi-api. Awal mulanya terjadi pada tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka. Keturunan rakyat sempat bertrok dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan masyarakat pribumi. Perselisihan tersebut berlanjut hingga pecah “peristiwa Bagan Siapi-api yang kedua” pada tanggal 19 September 1946, yang mana pada saat itu para keturunan mendapat bantuan dari tentara Tiongkok. Karena mendapat dukungan dari tentara Tiongkok, maka keturunan rakyat mengibarkan bendera Kuo Min Tang (bendera dua belas bintang RRT). Jika menilik kembali peristiwa sejarah, peristiwa Mei 1998 bukanlah satu-satunya tragedi yang menimpa etnis Tionghoa di Indonesia. Sebelumnya sudah ada daftar panjang kekerasan terhadap mereka di negeri ini, yakni pembantaian massal orang Tionghoa yang dilakukan VOC di Batavia pada tahun 1740 yang memakan korban jiwa hingga 10.000 orang dan pada masa Perang Jawa (1825-1830) juga terjadi pembunuhan terhadap orang Tionghoa.

Konflik antar suku terus terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah konflik antara pribumi dan non-pribumi terjadi lagi. Misalnya, salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan memaksakan asimilasi. Namun, pemerintahan Orde Baru kerap salah menerjemahkan konsep asimilasi. Akibatnya, komunitas etnis Tionghoa masih sangat menonjol dalam bidang ekonomi. Namun di bidang sosial, budaya, dan politik, mereka mendapat perlakuan yang kini dianggap diskriminatif. Ada sekelompok intelektual muda etnis Tionghoa yang mempunyai konsep asimilasi tersendiri. Konsep mereka adalah kelompok etnis Tionghoa harus menyatu dengan penduduk asli tempat mereka dilahirkan dan tinggal.

Pemimpin gerakan ini adalah K. Shidunata seorang etnis Tionghoa Katolik, ahli hukum dan juga perwira Angkatan Laut.

Pemahaman tersebut juga dianut oleh Junus Jahya, seorang ekonom jebolan Rotterdam yang meyakini bahwa permasalahan Tiongkok dapat diselesaikan dengan memasukkan sebanyak-banyaknya masyarakat Tiongkok ke dalam kelompok mayoritas yaitu Islam. Dan, dia sendiri masuk Islam pada tahun 1979, dan menikah dengan wanita Sunda. Menurut informasi, saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 30.000 orang etnis Tionghoa yang beragama Islam, namun berbagai upaya tersebut belum berhasil menyelesaikan permasalahan secara mendasar.

Muslim Tionghoa bukan lagi fenomena baru bagi kita. Bahkan pada abad ke-15, mereka membangun pusat pemerintahan Islam pertama di Indonesia yaitu Kesultanan Demak. Mereka adalah, Djien Soen (Adipati Yunus, Pati Unus), Sultan Trenggana (Toeng Kha Lho), dan Sunan Prawoto (Mock Ming), pemudik muslim satu angkatan dengan Laksamana Sam Po Khong alias Tjeng Ho yang terdampar dan membangun sebuah kapal. masjid di Semarang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan Tiongkok dan Islam di Indonesia sudah berlangsung lama. Bahkan peradaban Tiongkok sudah dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Di Kota Medan, komunitas Muslim Tionghoa merupakan kelompok minoritas di kalangan minoritas. Namun, sejak jatuhnya rezim Orde Baru, umat Islam Tionghoa di Tanah Air sudah bisa lebih terbuka dan bebas dalam identitas budaya dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Namun belum diketahui secara pasti berapa jumlah etnis Tionghoa Muslim yang ada di Kota Medan yang kita ketahui, etnis Tionghoa sudah ada di Kota Medan bahkan di kota-kota lain di Indonesia sejak zaman dahulu dan melalui sejarah yang panjang.

Pada awalnya etnis Tionghoa masuk Islam, hal ini merupakan upaya asimilasi yang kini memiliki arti sedikit lebih luas yaitu asimilasi. Asimilasi ini dilakukan agar tidak ada lagi konflik antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Jahja dalam Afif (2013:7) menyatakan bahwa dengan memeluk agama Islam, masyarakat Tionghoa tentu akan lebih mudah diterima oleh kelompok pribumi, karena mereka telah mempunyai kesamaan identitas sebagai umat Islam. Namun tak sedikit pula etnis Tionghoa yang masuk Islam karena panggilan iman. Sedangkan seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, hal ini diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antara pihak privat dan non privat. Dan asimilasi semacam ini adalah “zaman harapan bagi keturunan Tionghoa”.

Jika kita menilik kebelakang, Yuanzi dalam Afif (2013: 7-8) catatan sejarah menceritakan bahwa umat Islam Tionghoa pada zaman dahulu cukup berhasil melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi. Hal ini dibuktikan dengan abdi setia Laksamana Cheng Ho, Wang Jing Hong, yang tertinggal di Pelabuhan Simongan (sekarang Mangkang) karena sakit parah saat melakukan perjalanan ke nusantara. Saat itu mereka menemukan sebuah gua yang kemudian dijadikan tempat peristirahatan sementara untuk pengobatan Wang Jing Hong. Setelah Wang pulih, Cheng Ho melanjutkan perjalanannya ke Barat, meninggalkan sepuluh awak kapal, satu kapal dan perbekalan untuk menemani Wang. Wang memanfaatkan kapal itu

sebut saja berdagang. Dalam setiap pelayaran mereka singgah di beberapa pelabuhan dan kemudian di awal kapal beberapa dari mereka menikah dengan wanita setempat. berkat kerja keras Wang dan teman-temannya, tempat di sekitar gua menjadi ramai dan makmur. Banyak orang Tionghoa datang dan tinggal serta bertani di sana. Selain mengajari warga bercocok tanam, Wang juga menyebarkan Islam ke warga Tionghoa dan lokal. Wang meninggal pada usia 87 tahun. Atas jasanya, Wang diberi gelar Juru Mudi Dampo Awang Saat Ini.

Cukup jelas sejarah di atas membuktikan bahwa asimilasi warga Tionghoa Muslim dengan masyarakat pribumi sangat berhasil. Kondisi seperti ini terus berlanjut hingga akhirnya bubar ketika Belanda datang ke nusantara. Keharmonisan ini terpaksa berakhir karena Belanda melancarkan kebijakan perpecahan (*divide et impera*). Kebijakan ini lambat laun memisahkan etnis Tionghoa dari penduduk pribumi. The Siaw Giap dalam Afif (2013) menyatakan bahwa kebijakan diskriminatif ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan yang memasukkan orang Tionghoa ke dalam kelompok pribumi jika mereka kedapatan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat pribumi, baik itu tradisi, adat istiadat, atau memeluk Islam, sehingga Orang Tionghoa yang memeluk Islam otomatis akan diturunkan derajatnya sama dengan penduduk pribumi. (Utami, 2017)

Dengan demikian, bagi orang-orang Tionghoa yang memeluk Islam, dengan sendirinya status sosial mereka akan menurun mengikuti status sosial penduduk pribumi. Orang-orang etnis Tionghoa yang memutuskan untuk memeluk agama Islam sangat tidak jarang merasa terasing dan tertekan. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif dari keluarganya, bahkan ekstrimnya lagi tidak diakui menjadi bagian dari keluarga tersebut. Belum lagi ketika mereka berada dalam lingkungan masyarakat disekitarnya yang masih belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran mereka karena dianggap tetap sama dengan orang-orang etnis Tionghoa lainnya. Mereka menjadi minoritas dalam minoritas etnis Tionghoa yang merupakan bagian minoritas dalam masyarakat Indonesia

Kekhawatiran seperti itulah yang menginspirasi Haji Yap Siong dan Haji Karim Oey untuk mendirikan organisasi bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada tahun 1961. Selain didirikan sebagai wadah pendampingan para mualaf Tionghoa, dalam perkembangan selanjutnya PITI juga menjadi wadah sarana untuk agenda lainnya. Tujuan didirikannya PITI adalah untuk menyatukan Muslim Tionghoa dengan Muslim Indonesia, Muslim Tionghoa dengan etnis Tionghoa, dan etnis Tionghoa dengan penduduk asli. Melalui lembaga ini diharapkan masyarakat Tionghoa yang memutuskan untuk memeluk Islam tidak lagi merasa terasing dari identitas baru yang mereka anut, karena pada kenyataannya mereka tidak sendirian dalam memutuskan hidup sebagai Tionghoa Muslim. Dengan memeluk Islam, mereka juga akan lebih diterima sebagai saudara oleh mayoritas penduduk asli yang beragama Islam. (Pahrozi, 2018)

Haji Yap Siong masuk Islam pada tahun 1931 dan mendirikan organisasi dakwah Islam bernama Persatuan Islam Tionghoa (PIT) di kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia berdakwah dari Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan dan menyeberang ke Jawa Barat hingga Jawa Timur. Dalam dakwahnya Haji Yap Siong menggunakan bahasa Mandarin, ia mendapat izin berdakwah dari pejabat Kolonial Belanda. Pada tahun 1953 di Jakarta didirikan organisasi

keagamaan Muslim etnis Tionghoa dengan nama Persatuan Muslim Tionghoa (PTM) yang diketuai oleh Kho Guin Tjin. Tokoh Muslim Tionghoa lainnya seperti H. Abdul Karim Oei Tjing Hien, mengajak H. Yap Siong dan Kho Guan Tjin bertemu di Jakarta untuk mengembangkan organisasi tersebut, sehingga pada tahun 1954 kedua organisasi dakwah tersebut diganti dengan nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. (PITI). Namun dalam perjalanannya, menjelang pemilihan umum pertama tahun 1955, organisasi ini dibubarkan karena perbedaan pandangan mengenai keterlibatan PITI dalam politik. Perbedaan pendapat dan pandangan tersebut mengakibatkan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) tidak berfungsi sebagai organisasi, namun gerakan dakwah tokoh Muslim Tionghoa terus meluas. Bentuk kepedulian tokoh Islam Tionghoa dalam menyiarkan agama Islam adalah dengan dibentuknya kembali Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada tanggal 14 April 1961 di Jakarta, atas prakarsa H. Isa Idris dari Pusat Kerohanian TNI AD, yang dimana jumlah keanggotaannya berkisar 15 orang.

Perkembangan PITI yang semakin positif mendapat apresiasi yang cukup menggembirakan dimana banyak masyarakat yang mendukung organisasi ini sebagai wadah asimilasi. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya pejabat sipil dan militer yang ditempatkan sebagai pembina dan menjadi penasehat organisasi tersebut. Masuknya orang-orang dari TNI Angkatan Darat ke dalam PITI merupakan salah satu misi pemerintah, terutama dari TNI sendiri yang merupakan pendukung setia asimilasi, untuk mendukung setiap organisasi yang memfasilitasi proses asimilasi di masyarakat, sebagai pemecah permasalahan Tionghoa di Indonesia.

Organisasi PITI pada saat itu dianggap sebagai organisasi yang dinilai mampu mempercepat proses asimilasi, dengan menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa. khususnya masa pasca peristiwa G 30 S/PKI. Selain itu, pengurus PITI juga meminta langsung kepada TNI AD untuk mengirimkan orang-orang yang dinilai mampu mendukung pengembangan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, agar bisa diikuti sertakan dalam kepengurusan. Menurut Khozyn Arief, hal itu dilakukan karena saat itu TNI Angkatan Darat mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan bernegara, sehingga perkembangan PITI sebagai organisasi dakwah tidak terhambat. (Tendean, 2010)

Pada tahun 1960-1970an pasca pecahnya pemberontakan G30S PKI. Saat itu pemerintah sedang menggalakkan gerakan untuk membina persatuan bangsa dan pembentukan karakter, dimana simbol-simbol atau identitas yang dianggap bersifat disosiatif seperti istilah asing, bahasa dan budaya khususnya Tionghoa dilarang dan PITI pun merasakan hal tersebut. dampaknya, yang mana nama Cina dalam singkatan PITI dilarang. Pada tanggal 5 Juli 1972, Menteri Agama H.A Mukti Ali dalam suratnya No. MA/244/1972 menjelaskan bahwa Islam adalah agama universal dan memandang bahwa PITI tidak boleh ada, tidak boleh ada Islam Cina atau Islam lainnya. Pada tanggal 15 Desember 1972, Dewan Pimpinan Pusat PITI memutuskan untuk mengubah nama organisasi menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.

Singkatan dari organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia kemudian diubah menjadi Pembina Iman Tauhid Islam, karena keluarnya instruksi dari pemerintah (15 Desember 1972) yang menegaskan bahwa organisasi ini tidak boleh mempunyai ciri etnis tertentu. Meskipun

PITI merupakan wadah berkumpulnya umat Islam Tionghoa, namun pada Kongres Milenium (Kongres Nasional II) tahun 2000 di Jakarta, terjadi perdebatan di kalangan peserta mengenai apa yang diperjuangkan PITI. Ada pula anggota yang ingin kembali bergabung dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, karena begitulah nama organisasi tersebut didirikan dan mereka ingin kembali berperan dalam komunitas Muslim Tionghoa pada khususnya. Sebagian anggota lainnya ingin mempertahankan Pembina Iman Tauhid Islam, karena organisasi ini harus terbuka bagi seluruh umat Islam, meskipun mengutamakan keturunan Tionghoa. Dan pada akhirnya untuk menyelesaikan perdebatan tersebut disepakati penggunaan kedua singkatan tersebut sehingga singkatan PITI menjadi Pembina Iman Tauhid Islam dahulunya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang ditetapkan dalam rapat pimpinan organisasi tersebut pada pertengahan bulan Mei 2000. Keputusan ini diambil karena para anggota sepakat bahwa PITI mengutamakan etnis Tionghoa, namun juga terbuka bagi etnis lain.

Meski PITI merupakan organisasi yang bergerak dalam dunia dakwah Islam bagi orang-orang Tionghoa, faktanya PITI juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam AD/ART PITI tahun 1980, disebutkan bahwa PITI selain berasaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, juga berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai perwujudan atas keikutsertaannya menjadi warga negara Indonesia pada zaman Orde Baru yang mana menerapkan kebijakan bahwa segala organisasi masyarakat atau pun politik harus berdasar pada Pancasila. Selain itu, PITI akan melakukan usaha-usaha sosial bagi kesejahteraan umum seperti Balai pengobatan Rumah Sakit dan usaha-usaha lainnya yang dapat membantu anggota dan masyarakat umumnya. Hal demikian menunjukkan bahwa PITI tidak hanya bergerak sebagai organisasi Islam tetapi juga ikut menjadi bagian untuk mencapai pembangunan nasional dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. (Hasanah, 2019)

Dalam perjalanan organisasinya, PITI berkembang dengan pergantian pimpinan dari masa ke masa, dan cukup banyak cobaan yang dihadapi PITI untuk mencapai tujuan organisasi. Sejak masa Herman Santoso, H. Isa Idris, H. Yusuf Hamka, hingga masa Drs. H. Satibi Darwis saat itu, kemudian pada tahun 1987, pada tanggal 19-20 Desember 1987 PITI mampu menyelenggarakan MUNAS (Musyawarah Nasional) I di Cibubur Jawa Barat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Bapak H. Alamsyah Ratuprawiranegara). Dengan diadakannya kegiatan MUNAS I, PITI bertekad untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara, Munas I diikuti oleh delegasi dari 21 Provinsi dan 27 Daerah Tingkat II dari seluruh Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1961, PITI telah berkembang dari kota ke kota, seperti Koordinator Wilayah PITI Jawa Tengah, Koordinator Wilayah Jawa Timur, Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Koordinator Wilayah DKI Jakarta, Koordinator Wilayah Jawa Barat, Koordinator Wilayah Bengkulu, Regional Bangka Belitung Koordinator. Korwil Jambi dan Korwil Medan, serta Korwil-Korwil lainnya. (Utami, 2017)

a. Tujuan serta Visi dan Misi Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

Organisasi PITI merupakan wadah untuk dakwah Islam, sejak MUNAS I PITI tahun 1987 di Jakarta, membenahi dirinya dan melakukan kiprah ke depan untuk membina terwujudnya, antara lain :

- 1) Manusia seutuhnya: yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- 3) Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Adapun tujuan PITI yaitu “Terbentuknya insan muslim yang mengamalkan ajaran Islam guna ikut mewujudkan masyarakat yang sejahtera bahagia dunia dan akhirat di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Allah Swt. Sedangkan dari usaha yang dilakukan sesuai dengan tujuan PITI ialah:

- 1) Menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana kepada setiap warganegara Indonesia yang secara sukarela ingin menganut agama Islam.
- 2) Memberikan bimbingan dan pembinaan ajaran Islam bagi anggotanya.
- 3) Mengadakan hubungan serta kerjasama antar organisasi Islam guna terwujudnya ukhwah Islamiyah.
- 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, sosial, yang bermamfaat bagi agama, Nusa, Bangsa dan Negara.

Dalam mencapai maksud tersebut PITI menjabarkan dalam bentuk program yang fleksibel dalam berbagai sektor dengan asas prioritas dan komunitas program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dua butir prioritas program PITI ialah Konsolidasi organisasi dan Dakwah Islam dari arti yang luas. Dimaksudkan sebagai awal pembenahan dan modal awal gerak dinamika selanjutnya, Budaya musyawarah digalakkan dalam proses mekanisme konsolidasi PITI; Muswil (Musyawarah Wilayah) dan Muscab (Musyawarah Cabang), kini sudah sebagian besar wilayah mengadakan muswil ; diantaranya Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jakarta, Maluku dan Sumatera. (Harahap, 2012)

Visi PITI adalah mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin. Sedangkan misi PITI didirikan untuk mempersatukan muslim Tionghoa dengan muslim Indonesia, muslim Tionghoa dengan etnis Tionghoa non-Muslim, dan etnis Tionghoa dengan umat Islam.

Program PITI bertujuan untuk menyampaikan pemahaman dan dakwah Islam khususnya kepada masyarakat etnis Tionghoa, serta pelatihan berupa bimbingan dan pengajaran kepada umat Islam Tionghoa dalam menerapkan syariat Islam, baik di lingkungan keluarganya yang belum masuk Islam maupun sebagai persiapan untuk bersosialisasi dan berbaur dengan umat Islam, di daerah dimana mereka tinggal dan bekerja serta membantu dan memberikan perlindungan bagi mereka yang terbuang dan dikucilkan oleh keluarganya karena memilih dan memutuskan untuk masuk Islam. (Harahap, 2015)

b. Struktur Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

Dalam suatu organisasi bias anya terdapat susunan atau struktur yang mengatur pelaksanaan organisasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat terorganisirnya kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Dengan adanya susunan atau struktur organisasi, semua anggota di dalamnya dapat lebih mengerti akan tugas yang dijalankannya dan bertanggung jawab sesuai dengan yang diinginkan organisasi.

Berikut penjelasan mengenai struktur keorganisasian PITI diantaranya adalah:

- 1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), ruang lingkupnya meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), ruang lingkupnya meliputi provinsi
- 3) Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ruang lingkupnya meliputi kabupaten/kota
- 4) Dewan Pimpinan Cabang (DPC), ruang lingkupnya meliputi kecamatan dan kelurahan

Sesuai dengan keterangan diatas mengenai struktur organisasi PITI, maka organisasi PITI di kota Medan termasuk kedalam struktur kepengurusan DPD yang ruang lingkupnya meliputi kabupaten/kota. Masa jabatan dari kepengurusan organisasi PITI bertahan selama lima Tahun.

Dalam hal ini organisasi PITI Medan merupakan Dewan Pimpinan Cabang yang memiliki sununan kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Seorang Ketua: Sebagai pemimpin suatu organisasi yang dapat merencanakan atau membuat perencanaan organisasi demi kemajuan organisasi tersebut. Mengorganisir dan membagi tugas kepada setiap anggota.
- 2) Seorang Wakil Ketua: membantu ketua dan bertanggung jawab kepada ketua apabila dalam pengembalian keputusan ketua tidak ada.
- 3) Seorang Sekretaris: Membuat laporan pertanggung jawaban oleh setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
- 4) Wakil Sekretaris: Membantu sekretaris dalam menyusun dan menata tugas-tugas sekretaris, bekerja sama dengan biro kesekretariatan.
- 5) Bendahara: Melakukan pengolahan data yang dihimpun dari sumber-sumber yang sah, dan untuk kepentingan operasional organisasi melimpahkan sebagian wewenang kepada wakil bendahara.
- 6) Wakil Bendahara: Melaksanakan sebagian wewenang bendahara yang telah dilimpahkan kepadanya, menyangkut penggalan dana serta Rencana Anggaran Belanja untuk kegiatan organisasi.
- 7) Seksi-Seksi : Untuk mengatur segala kegiatan yang telah direncanakan oleh para pengurus organisasi. (Amanda, 2016)

c. Arti Lambang Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

Setiap organisasi pasti memiliki lambang, seperti halnya organisasi PITI memiliki sebuah lambang yang memiliki makna tersendiri. Lambang yang digunakan Pembina Iman Tauhid Islam, merupakan perpaduan antara lambang Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan Pembina Iman Tauhid Islam, yang dibentuk pada 1972.



Gambar 1. Lambang Organisasi PITI

Sumber: *internet biromuslim.com*

Lambang yang digunakan Pembina Iman Tauhid Islam memiliki makna, sebagai berikut:

- 1) Wujud Lambang yaitu:
 - a. Berbentuk segi lima yang melambangkan rukun Islam.
 - b. Kata Allah dan Muhammad (Khath huruf Arab), melambangkan aqidah Islamiyah berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist.
 - c. Bulan dan bintang melambangkan kekuasaan Allah SWT yang Rahmatan Lil Alamin (rahmat bagi sekalian alam).
 - d. Kata PITI, merupakan singkatan dari Pembina Iman Tauhid Islam.
 - e. Dalam bingkai segi lima tertera kalimat Pembina Iman Tauhid Islam d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.
- 2) Arti Warna yaitu:
 - a. Warna hijau melambangkan kesuburan, kedamaian dan kebahagiaan.
 - b. Warna kuning melambangkan Nur Ilahi yang menerangi batin manusia.
 - c. Warna putih melambangkan kesucian niat dan itikad.
 - d. Warna hitam melambangkan keteguhan dan tekad perjuangan dalam menunaikan tugas.
- 3) Makna Lambang yaitu Menggambarkan tekad dan keteguhan perjuangan PITI dalam melaksanakan ajaran Islam secara kaffah guna meningkatkan iman dan takwa serta mewujudkan masyarakat yang sentosa, sejahtera serta bahagia lahir dan batin. Adapun bendera PITI berbentuk persegi empat panjang dengan warna dasar putih dan lambang PITI di tengahnya. (Chandra et al., 2015)

Dari lambang PITI di tahun 1972, dapat dilihat unsur PITI di tahun 1961, yaitu tulisan Allah dan Muhammad dalam bahasa Arab. Hal tersebut menandakan bahwa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sama dengan Pembina Iman Tauhid Islam.

Dalam AD/ART PITI tahun 1980, disebutkan azas dari Pembina Iman Tauhid Islam selain berazaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, juga berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini didasarkan pada ketentuan pada zaman Orde Baru yang menetapkan bahwa

setiap organisasi baik itu politik ataupun kemasyarakatan, harus berlandaskan pada Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat pertentangan antara pemerintah dengan organisasi yang bersangkutan, dalam menjalankan fungsinya di negara Republik Indonesia, dalam rangka mempercepat tujuan nasional dalam pembangunan nasional. (Tendean, 2010)

2. Sejarah Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Kota Medan

Pada tahun 1930 ada kegiatan penyebaran Islam yang meningkat oleh Tionghoa Muslim kepada Tionghoa non-Muslim untuk masuk Islam. Namun, sayangnya tidak ada sumber yang terkait dengan banyaknya jumlah peningkatan pada masa itu. Pada sekitar tahun 1933 Partai Tionghoa Islam Indonesia (PTII) didirikan yang bertujuan untuk mengangkat status etnik Tionghoa dengan cara masuk Islam. Sementara itu, pada tahun 1936 di Medan Haji Yap Siong atau Haji Abdussomad mendirikan Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dengan beberapa pengikut. Lewat organisasi ini, mereka mencoba mewujudkan keIslaman dan identitas keTionghoan mereka secara bersamaan. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, dibawah kepemimpinan Abdul Karim Oie Tjeng Hien persatuan Islam Tionghoa memindahkan kantor pusatnya dari Medan ke Jakarta. (Sabrina, 2021)

Awalnya organisasi ini bernama Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang didirikan oleh H. Abdul Karim (Oey tjeng Hien) dan H. Abdul Somad (Yap A Siong) yang merupakan tokoh Islam Tionghoa di Medan. Tujuan organisasi ini didirikan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat muslim Tionghoa dan mengajak masyarakat Tionghoa yang telah memeluk agama Islam agar tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Akan tetapi PIT yang telah berdiri lama ini ternyata keberadaannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Islam Tionghoa di kota Medan. Hal ini membuat H. Abdul Karim, H. Abdul Somad, dan ketua PTM (Persatuan Muslim Tionghoa) yaitu Kho Goa Tjin, yang berpusat di Bengkulu melakukan penggabungan. Kedua organisasi ini, PIT dan PTM bergabung menjadi satu dengan berganti nama menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Organisasi dengan nama PITI inilah yang kemudian berkembang sampai sekarang. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sebenarnya kota Medan memiliki peranan besar terhadap perkembangan masyarakat Tionghoa Islam, dan ini terbukti karena di kota Medan telah berdiri satu organisasi Tionghoa Islam yang telah ada sejak lama.

Dalam sejarah organisasi ini perlu dicatat bahwa dalam upaya peningkatan dakwah dikalangan masyarakat Tionghoa Islam secara terorganisir itu dilakukan oleh PIT sebagai organisasi Tionghoa Islam di Medan. Pada waktu terjadinya penggabungan kedalam PITI, ketua PITI adalah Nurdin (Mao Tze Fang) yang sering dijuluki oleh orang Aceh sebagai “Tengku” (kemudian pernah menjadi Bupati Aceh Tengah). (Amanda, 2016)

Pada tahun 1961, PITI resmi menjadi organisasi Tionghoa Islam dan mempunyai tujuan yaitu untuk mempersatukan muslim Indonesia dengan muslim Tionghoa, dan muslim Tionghoa dengan orang Tionghoa serta umat Islam dengan orang Tionghoa. Setelah berdiri dan resmi menjadi suatu organisasi Tionghoa Islam, keberadaan organisasi PITI mulai dapat dirasakan masyarakat Tionghoa di berbagai daerah, terutama warga Tionghoa muslim di kota

Medan. Seperti yang telah disebutkan, PITI mulai berkembang di kota Medan pada Tahun 1961 sebagai salah satu Organisasi Islam di Medan.

Tahun 1961 adalah tahun bersatunya dua organisasi Tionghoa Islam yang sebelumnya telah lama berdiri. Tahun ini merupakan tahun dimana orde lama masih berkuasa. Pada masa orde lama, PITI tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti. Hal ini dikarenakan pada masa ini kecaman terhadap masyarakat Tionghoa terus terjadi. Begitu juga dengan organisasi Tionghoa Islam. Keinginan dari anggota dan jajaran pengurus untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena masyarakat ketika itu menganggap masyarakat Tionghoa adalah penganut paham komunis, lahirnya organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) tidak juga dapat menghapus anggapan itu.

Hal yang sama terjadi di kota Medan terhadap organisasi Tionghoa Islam lama ada di Medan (1953) dengan nama Persatuan Islam Tionghoa (PIT). Dalam perjalanan panjang PITI di kota Medan, tidak dapat dilupakan peranan penting dari tokoh-tokoh yang dapat mempertahankan PITI sebagai organisasi Tionghoa Islam di kota Medan. Tokoh tersebut adalah adalah H. Yap A Siong, Lai The Sen (Zulfikar), Sowan Maw Tia, dan Tjin Kwin. Di era orde baru terjadi perubahan karena semua yang berbau etnis dilarang untuk berkembang. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat tidak boleh dilakukan. Aspek sebagai penganut paham komunis yang sudah melekat pada orang Tionghoa di era orde lama tetap melekat pada era orde baru. Tidak terkecuali dengan masyarakat Tionghoa Islam dan organisasi Tionghoa Islam. Peristiwa pelarangan itu juga terjadi di kota Medan. Tidak terkecuali terhadap masyarakat Tionghoa yang telah menjadi seorang muslim. (Amanda, 2016)

Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang telah ada sejak era orde lama juga tidak mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan selayaknya organisasi Islam lainnya di Medan. Pelarangan tersebut membuat PITI harus menghapus kata Tionghoa yang tercantum pada kata PITI. Dengan kesepakatan bersama dari pengurus dan anggota PITI, pada tahun 1972 kepanjangan PITI telah menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia. Kata Tionghoa dihapus setelah berganti nama menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia, organisasi PITI mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan dakwah seperti organisasi Islam lainnya di Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku ketua Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di kota Medan (24 November 2023) juga mengatakan bahwa:

“PITI ini sudah ada sebelumnya tahun 1961 dan awalnya PITI ini namanya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada tahun 1961, kemudian pada masa Soeharto atau orde baru keluarnya pelarangan atau tidak boleh ada nama-nama etnis dan PITI ini diganti kepanjangannya menjadi Pembinaan Iman Tauhid Islam dan ketua umumnya pun bukan dari etnis Tionghoa lagi jadi pada saat itu keanggotannya campur. Pada saat itu dari situ ketuanya kalo gak salah dari Brighjen atau Kemiliteran Dan kemudian diadakanlah Mukhtar tahun 2000-an nama PITI dikembalikan lagi kepanjangannya menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia”.

Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang sebelumnya telah mengganti kepanjangannya menjadi Pembinaan Iman Tauhid Islam ingin mengembalikan kata Tionghoa di dalamnya. Akhirnya pada tahun 2000 diadakannya Mukhtar Nasional II di Jakarta, melalui musyawarah antara anggota dan para pengurus terjadi perdebatan mengenai kepanjangan PITI ini. Sebagian anggota menghendaki kembali Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dikarenakan nama awal didirikannya organisasi tersebut dan ingin kembali berkibrah untuk muslim Tionghoa khususnya. Dan sebagian anggota lainnya ingin mempertahankan Pembinaan Iman Tauhid Islam dikarenakan organisasi ini harus terbuka kepada semua umat Islam, walaupun mengutamakan etnis Tionghoa. Akhirnya untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, maka disepakati dengan menggunakan kedua kepanjangan tersebut, sehingga kepanjangan PITI menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan tidak membuang kepanjangan Pembinaan Iman Tauhid Islam dahulu. Hal ini dikarenakan para anggota ingin menunjukkan jati diri mereka sebagai warga Tionghoa yang telah menganut agama Islam, namun juga terbuka bagi etnis lainnya. (Utami, 2017)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Ali Sulaiman selaku sekretaris organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di kota Medan juga mengatakan alasan dikembalikannya lagi nama kepanjangan dari PITI itu dari Pembinaan Iman Tauhid Islam menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Berikut petikatan wawancaranya (22 November 2023):

“PITI kan dari awal Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan diganti dengan Pembinaan Iman Tauhid Islam jadi seperti kamuflase jadi peran tionghoa itu tidak nampak jadinya banyak teman-teman gak mau perduli dan akhirnya diganti lagi menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Pada saat zaman Gusdur sudah ada kebebasan dan kepanjangannya di ganti lagi ke awal maksudnya kembali ke jati diri kita sebagai etnis Tionghoa.”

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk menegakkan Ukhuwah Islamiyah di kalangan Muslim Tionghoa merupakan salah satu tonggak berdirinya organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang bertujuan supaya Muslim Tionghoa dapat lebih merasakan dan mendalami agama yang dianut mereka.

B. Perkembangan Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Kota Medan Tahun 1998-2023

Di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di kota Medan, masyarakat Tionghoa Muslim merupakan minoritas di antara minoritas. Setiap etnis biasanya mempunyai perkumpulan atau organisasi yang dapat meningkatkan kebersamaan sesama mereka, sekaligus untuk menunjukkan eksistensi mereka. Sama halnya dengan etnis Muslim Tionghoa Medan yang mempunyai organisasi bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau yang disebut PITI yang didirikan oleh H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien).

Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru terkena dampaknya dikarenakan pada masa itu pemerintah sedang menggalakkan gerakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana identitas yang bersifat menghambat pembauran, seperti istilah, bahasa dan budaya asing dilarang dan dibatasi. Berdasarkan surat

pimpinan PITI No. 101/PP/Pb/1972 kepada Kejaksaan Agung, pada 5 Desember 1972, menyatakan bahwa Persatuan Islam tionghoa Indonesia dibubarkan. (Tendean, 2010) Nama Tionghoa pada kepanjangan PITI dilarang dan diganti dengan Pembinaan Iman Tauhid Islam.

Menurut hasil wawancara Bapak Muhammad Ihsan selaku ketua organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia kota Medan mengatakan bahwa, dalam perkembangan organisasi PITI ini dari tahun 1998 yaitu mengalami stagnasi, semua kegiatan terhenti. Dan beliau juga mengatakan PITI di kota Medan ini bisa dikatakan “dia ada nama namun tidak ada wujud”. Dikarenakan orang-orangnya masih trauma karena kejadian tahun 1998 yang dimana etnis Tionghoa yang terkena sasarannya. Sehingga PITI di Medan Sumatera Utara ini mengalami stagnasi. Dalam artian bahwa keberadaan organisasi PITI Medan ini ada namun dalam keaktivitasan kegiatan dalam organisasi PITI ini kurang dirasakan oleh masyarakat bahkan keanggotaan organisasi itu sendiri.

Kemudian Bapak Ali Agung Sulaiman selaku sekretaris Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di kota Medan juga mengatakan bahwa “...memang pada saat orde baru PITI khususnya di kota Medan itu mengalami stagnan, PITI di pusat saja beberapa pendiri ajalah yang aktif dan pada saat itu tidak ketara adanya suatu kegiatan, adapun tapi bersifat individu dari keanggotannya”.

Organisasi PITI memiliki tujuan mempersatukan muslim Indonesia dengan muslim Tionghoa dan muslim Tionghoan dengan etnis Tionghoa serta umat Islam dengan etnis Tionghoa. Berdasarkan tujuan inilah keinginan organisasi PITI sangat kuat untuk dapat menyampaikan dakwah sesuai dengan tujuan awal pendirian organisasi PITI. Namun, pada saat PITI mulai aktif untuk melakukan kegiatannya setelah berganti nama, PITI mendapatkan halangan lagi yaitu adanya peristiwa Mei 1998 yang banyak memakan korban masyarakat Tionghoa. Peristiwa ini adalah titik yang sangat menakutkan bagi masyarakat Tionghoa, tidak terkecuali masyarakat Tionghoa Islam. PITI yang ketika itu telah menghapus kata Tionghoa didalamnya, tidak diizinkan kembali melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan anggota PITI merupakan masyarakat Tionghoa yang masih dianggap sebagai penganut paham komunis. Peristiwa pelarangan itu terjadi juga di kota Medan, dan kemudian berakhir pada akhir tahun 1998. (Amanda, 2016)

Peristiwa reformasi yang terjadi pada Mei 1998 juga merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat Tionghoa. Peristiwa ini juga berdampak negatif pada organisasi itu, walaupun merupakan organisasi Islam, mereka tidak dapat menjalankan kegiatan organisasinya. Barulah setelah berakhirnya peristiwa itu, dengan munculnya era baru yaitu era reformasi, barulah aktivitas organisasi PITI bisa dilaksanakan kembali.

Seiring dengan berjalannya waktu pada era reformasi tahun 2000, PITI melakukan perubahan. Muktamar Millenium (Muktamar Nasional II) pun digelar guna membangkitkan kembali semangat dan struktur organisasi PITI. Pada Muktamar ini, akhirnya secara resmi ditetapkan Ketua Umum yaitu Bapak H.M. Trisno Adi Tantiono selaku Ketua Umum Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PITI 2000-2005. Dalam perjalanan selanjutnya,

karena kesibukan kerja dan alasan yang bersifat pribadi Bapak H.M. Trisno Adi Tantiono mengundurkan diri, sehingga sejak tanggal 2 Oktober 2003 forum internal sepakat mengangkat atau menunjuk sebagai Ketua Umum Bapak H.M. Jos Soetomo. Mukhtar Nasional III PITI di Kota Surabaya tanggal 2-4 Desember 2005, untuk periode 2005-2010, terpilih kembali sebagai Ketua Umumnya Bapak H.M. Trisno Adi Tantiono. Kemudian setelah masa periode Bapak H.M. Trisno Adi Tantiono berakhir, PITI tidak kembali mengadakan Mukhtar dikarenakan masalah dana. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2012, baru diadakan kembali Mukhtar Nasional PITI yang ke IV yang diselenggarakan di Pontianak, dan hasilnya menyepakati bahwa PITI mempercayai Bapak Anton Medan untuk mengemban jabatan Ketua Umum DPP PITI. (Utami, 2017)

Pada saat PITI diresmikan pada tahun 1961 adanya permasalahan yang diakibatkan karena gejolak politik, pada saat itu banyak permasalahan yang dihadapi meskipun etnis Tionghoa yang sudah memeluk Islam masih juga terlibat. Hal ini juga mengakibatkan lembaga yang menaungi etnik Tionghoa Muslim (PITI) menjadi vakum dan aktif kembali tahun 2004. Sementara itu, perkembangan Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada tahun 2004-2023 yang mana dalam rentang tahun tersebut, PITI baik itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Medan sudah beberapa kali berganti posisi kepengurusan.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Periode Tahun 2004-2009 | |
| Ketua DPW Sumatra Utara | : Drs. Anwarsyah Noor, MA |
| Ketua DPD Medan | : Muhammad Chow Chin Wie (Awi) |
| Sekretaris | : - |
| Bendahara | : Hj. Lilie Swandi (Gho Beng Lie) |
| b) Periode Tahun 2009-2014 | |
| Ketua DPW Sumatra Utara | : Drs. Anwarsyah Noor, MA |
| Ketua DPD Medan | : Jaffar Siddiq |
| Sekretaris | : Hj. Rosmita |
| Bendahara | : Hj. Halimah |
| c) Periode Tahun 2014-2019 | |
| Ketua DPW Sumatera Utara | : H. Ayub, SH, MH |
| Ketua DPD Medan | : Muhammad Ihsan (Liaw Ik Chang) |
| Sekretaris | : Ali A Sulaiman, Amd (Lau Tek Lie) |
| Wakil Sekretaris | : Juli Utari (Lie Mei Ling) |
| Bendahara | : Hj. Lilie Swandi (Gho Beng Lie) |
| d) Periode Tahun 2019-2024 | |
| Ketua DPD Medan | : Muhammad Ihsan (Liaw Ik Chang) |
| Sekretaris | : Ali A Sulaiman, Amd (Lau Tek Lie) |
| Bendahara | : Hj. Lilie Swandi (Gho Beng Lie) |
| e) Seksi Bidang Organisasi Kekaderan, Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata | : Andi Huaang (Tham Cien Siong) |
| f) Seksi Bidang Keagamaan dan
Dakwah | : H. Rahmad (Wang Kok Hua) |

- g) Seksi Bidang Pendidikan dan Pendalaman
Akulturasi Budaya : Sofian Hartono (Tham Chien Siong)
- h) Seksi Bidang Kemitraan dan Pengembangan
Ekonomi : Poniran (Lim Han Wie)
- i) Seksi Bidang Advokasi dan Konsultasi
Hukum : Amin Thomas, SH (Tan Kok Min)
- j) Seksi Bidang Peran serta Perempuan : Mulyana (Chen Mei Lien)
- k) Seksi Bidang Informasi dan
Teknologi : M. Zein (Su Siek Tjen)
- l) Seksi Bidang Relawan Sosial Lingkungan dan
Kehumasan : Zulfadli (Su Eng Lai)

Susunan kepengurusan DPW PITI di Sumatera Utara periode 2014-2019 sesuai SK DPP PITI No. 005/SK/DPP PITI/2014 Tanggal 05 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh H. Muhammad Ramdhan Effendi atau yang dikenal dengan nama Anton Medan (Ketua Umum) dan Dr. Ipong Hembing Putra (Sekretaris Jendral).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua PITI Medan mengenai jumlah keanggotaan PITI Medan yaitu ada seratusan orang, tetapi yang aktif tidak semua anggota. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa kurangnya kearsipan kepengurusan dari Organisasi PITI Medan. Hal ini dikarenakan kurang aktifnya para pengurus maupun anggota Organisasi PITI Medan ini. Dan juga disebabkan karena masalah waktu yang mana kebanyakan dari anggota PITI adalah berprofesi sebagai wiraswasta. Dan minimnya anggaran keluarga juga menjadi persoalan banyaknya anggota PITI yang kurang aktif. Karena dalam organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pendanaan, karena tanpa sumber ini organisasi tidak bisa berjalan secara efektif. Pendanaan PITI selama ini adalah dari iuran dan suka rela dari pengurus dan anggota tanpa ada aturan bahwa setiap anggota diwajibkan membayar iuran. Selain itu, pendanaan kadang-kadang juga dibantu oleh pihak donator dari para pengusaha etnis Tionghoa dan pemerintah, yang dimana harus diajukan sebuah permohonan bantuan dari organisasi PITI.

Dalam perjalanannya PITI Medan mengalami pasang surut didalam kegiatan maupun aktivitasnya. Dimana hasil wawancara terhadap Bapak Muhammad Ihsan selaku Ketua PITI Medan mengatakan "...untuk kegiatan PITI Medan kita melakukan arisan, pengajian sebulan sekali dan mengadakan kurban serta pembinaan terhadap etnis Tionghoa yang ingin masuk Islam. Namun pada saat terjadi pandemi Covid jadi stagnasi dan sampai sekarang belum lagi aktif. Dikarenakan mungkin masing-masing dari kita ada kegiatannya tersendiri. Seperti kegiatan pengajian dilingkungannya sendiri karna anggota PITI ini tinggal di daerah yang berjauhan seperti belawan, marelان, dan ada juga di binjai. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab pertemuan kita menjadi sulit dan dikarenakan faktor ekonomi juga yang dimana keadaan ekonominya rata-rata menengah ke bawah. "

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa sumber bahwa masalah finansial merupakan faktor utama yang menghambat perjalanan keorganisasian PITI yang berada di kota Medan. Yang mana tanpa adanya anggaran keluarga, sulit bagi PITI Medan untuk

merealisasikan agenda-agenda PITI yang melibatkan seluruh anggota PITI. Makanya banyak dari anggota PITI Medan yang non aktif dikarenakan jarang nya melakukan pertemuan terhadap pengurus maupun anggota PITI yang lain. Selain itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 juga mengakibatkan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi PITI Medan ini. Sehingga kantor sekretariat PITI Medan yang berada di Jl. Mantri Kel. Kampung AUR dialih fungsikan menjadi tempat sekolah pengajian anak-anak. Namun untuk mempertahankan eksistensi organisasi PITI Medan sedang membangun tempat ibadah yaitu Masjid Cheng Ho yang dibangun di Brastagi. Yang dimana nantinya ciri khas arsitekturnya oriental Cina dan akan dijadikan juga sebagai tempat pariwisata. Hal ini supaya organisasi PITI Medan dapat terlihat ada di kota Medan dan dapat mempererat silaturahmi antar sesama Tionghoa Islam khususnya. Dalam pembangunan pada masjid ini didanai oleh Bapak Purba dan istrinya yang merupakan etnis Tionghoa yang juga bergabung di organisasi PITI ini.



Gambar 2. Kantor Sekretariat PITI Medan di Jl. Mantri AUR

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

C. Peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan

Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia merupakan organisasi yang memiliki visi misi menyebarkan dakwah dikalangan etnis Tionghoa. PITI didirikan untuk menjadi wadah untuk berbaur kepada Muslim Tionghoa dengan muslim pribumi, muslim Tionghoa dengan etnis Tionghoa dan etnis Tionghoa dengan umat Islam. Adapun peran PITI yaitu menyampaikan dakwah Islam khususnya kepada etnis Tionghoa, dan pembinaan dalam bentuk bimbingan agar menjalankan syariat Islam dengan baik di lingkungan keluarga yang masih non muslim dan juga persiapan berbaur dengan umat Islam serta sebagai wadah pembelaan dan perlindungan bagi mereka yang baru memeluk agama Islam.

Peran organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dalam perkembangan muslim tionghoa yaitu pembinaan keagamaan terhadap para muallaf. Sebagai organisasi dakwah sosial dikalangan etnis Tionghoa, PITI berperan melalui beberapa program-program kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan atau Tarbiah

Kegiatan ini dengan menyelenggarakan pengajian yang dibawakan para ustad dari kalangan etnis Tionghoa maupun non tionghoa yang dimana materinya mengenai wawasan keislaman secara umum.

2. **Majlis Taklim Muslimat**

Membentuk majlis taklimat muslimat sebagai sarana pengajian dan taklimat bagi perempuan Tionghoa yang dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah. Program pengajiannya yaitu pengenalan huruf-huruf hijaiyah dan dasar-dasar bacaan al-Qur'an

3. **Ibadah Ramadhan**

Kegiatan buka bersama dan sholat tarawih serta diadakannya ceramah agama. PITI juga menerima bayaran zakat fitrah serta menyalurkan dan membagi kepada para muallaf yang membutuhkan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dibagikan kepada masyarakat Islam pribumi.

4. **Pengislaman**

Program pengislaman ini diadakan di sekretariat PITI. Orang etnis Tionghoa yang ingin memeluk agama Islam datang sendiri ke sekretariat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan terus bergabung menjadi anggota PITI. Selain itu, PITI juga aktif dalam menghadiri proses pengislaman dalam rangka memberikan dukungan moral bagi orang yang baru memeluk Islam.

5. **Memperingati Hari Besar Islam**

Memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, israk mikraj, tahun baru hijriyah dan lain sebagainya. peringatan ini bertujuan untuk memahami peristiwa-pristiwa besar Islam, karena peristiwa-pristiwa tersebut dapat diambil hikmahnya sebagai panduan mengarungi kehidupan dunia supaya tetap berada di jalan yang di ridhoi oleh Allah swt.

6. **Bidang Sosial Kemasyarakatan**

Mengadakan kunjungan ke beberapa organisasi Islam lainnya di Medan dan membuat kerja sama dalam bidang dakwah maupun silaturahmi. PITI telah menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam bidang sosial kemasyarakatan, PITI juga memberikan perlindungan kepada muallaf yang menghadapi masalah dengan keluarganya yang disebabkan memeluk agama Islam dengan mencari jalan keluarnya.

Dengan adanya pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui pembinaan keagamaan untuk para muallaf dapat menjadi salah satu perkembangan muslim Tionghoa di kota Medan yang diwujudkan melalui program-program kegiatan yang telah peneliti gambarkan diatas. Dengan adanya program-program PITI tersebut, maka dapat menjadi tempat menjalin tali persaudaraan dan saling mendukung muslim tionghoa dengan saudara baru dan antara muslim Tionghoa dengan umat Islam serta berdampak bagi cara pandang etnis Tionghoa Muslim untuk menjadi Islam sejati yang di rahmati Allah swt.

Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sangat diperlukan untuk perkembangan etnis Tionghoa muslim sebagai wadah silaturahmi dan saling memberi dukungan dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim sejati. Sedangkan bagi etnis Tionghoa non muslim PITI ini merupakan sebagai jembatan mereka untuk bersosialisasi kepada etnis Tionghoa muslim dan masyarakat pribumi dan menjadi sarana mereka untuk belajar mengenai Islam bagi yang ingin memeluk agama Islam. Dan bagi pemerintah PITI sebagai komponen

bangsa yang dapat berperan strategis sebagai jembatan penghubung antar suku dan etnis untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam menjalankan sebuah organisasi, bukan berarti tidak memenuhi halangan. PITI juga mengalami naik dan turunnya eksistensi keorganisasiannya. Sekarang PITI Medan banyak mengalami penurunan keaktifan organisasiannya. Ini diakibatkan kurangnya kesadaran para pengurus dan anggota untuk memajukan organisasi tersebut. Dikarenakan alasan pekerjaan dan jarak yang cukup jauh maka kurangnya waktu untuk menjalankan organisasi tersebut. Dan kurangnya dana juga menjadi penghambat perkembangan organisasi PITI di kota Medan.

D. Perkembangan Muslim Tionghoa di Indonesia

1. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa di Indonesia

Sejak abad pertama kawasan laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan Internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Barat. Jalur ini terbentang jauh dari teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka dengan diikuti berkembangnya kekuasaan besar yaitu Cina di bawah Dinasti Tang (616 - 907), Indonesia di bawah Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 – 14) serta Timur Tengah di bawah kekuasaan Dinasti Umayyah (660 – 749) dan Dinasti Abasiyah (750 – 870). (Maspuhah, 2018)

Salah satu sumber rujukan kedatangan orang Tionghoa dari daratan Tiongkok di kepulauan Nusantara adalah tercatat perjalanan biksu Budha Tionghoa, bernama Fa Xian (disebut juga Fa Hien atau Faxien) yang menyempatkan singgah di Ya-va-di (nama lain Jawa) selama perjalanan menuju India antara tahun 400-414 Masehi. Perjalanan tersebut tercatat dalam bukunya Fahueki atau "Fo Guo Ji, "Catatan Negara-negara Buddhis". Sumber populer lain mengenai keberadaan orang Tionghoa di Nusantara adalah catatan perjalanan pendeta Budha I-Tsing yang melakukan perjalanan spiritualitasnya dari Kanton ke India, melalui Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. (Habiburrohman, 2022)

Sebelum abad ke-8, catatan-catatan tersebut merupakan rekaman perjalanan-perjalanan bangsa Tionghoa ke Nan Yang (negara-negara Selatan) yang terbatas pada perjalanan keagamaan melalui jalur laut. Setelah abad ke-8, aktivitas perniagaan banyak dilakukan ke Nan Yang melalui perjalanan laut, mengingat banyaknya komoditas yang dihasilkan dari daratan Tiongkok. Komoditas yang diperdagangkan tidak hanya barang dan hasil bumi, melainkan juga manusia (sebagai budak). Dengan semakin ramainya arus perdagangan ke Selatan, semakin banyak pula migrasi bangsa Tionghoa ke kepulauan Nusantara, termasuk para tenaga kerja Tionghoa. Orang-orang Tiongkok dikenal sebagai ahli dalam teknologi pertanian dan pertukangan, sehingga tenaga mereka banyak dibutuhkan di wilayah Nan Yang.

Etnis Tionghoa yang datang ke Indonesia sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi selatan seperti Guangdong, Fujian, dan Guangxi. Oleh sebab itu, kelompok terbesar masyarakat Cina perantauan di Asia Tenggara adalah suku-suku Hokkian, Teochiu, Kanton, Hakka dan Hainan. maka dari itu bisa dikatakan bahwa Tionghoa perantau ini memiliki kecenderungan

untuk mempertahankan kepercayaan religi dan kebudayaan mereka walaupun sudah ada di kalangan mereka yang memeluk agama Islam.

Terdapat dua faktor yang mendorong kedatangan etnis Tionghoa perantauan (*huaqiao*) ke Hindia Belanda. Pertama yaitu karena ekonomi. Pada akhir abad ke-19, Cina mengalami masalah ledakan penduduk yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, kerusakan dan keresahan sosial. Hal itu kemudian menyebabkan melemahnya sistem kekaisaran Cina. Dan diperburuk lagi dengan terjadinya bencana alam di negeri itu. Dengan kondisi tersebut banyak etnis Tionghoa yang meninggalkan kampung halamannya dan mencoba mengadu nasib ke berbagai negara yang mengalami kekurangan penduduk di Asia Tenggara yang memiliki kondisi dan prospek ekonomi serta kekayaan alam yang lebih baik. Alasan kedua, yaitu karena politik. Banyak patriot Cina yang mengalami kekecewaan oleh pergantian kekuasaan dari Dinasti Ming (1368-1644) ke Dinasti Qing (1644-1911). Dinasti Qing yang didirikan oleh suku Manchu dianggap sebagai dominasi Cina oleh bangsa asing, oleh karena itu banyak etnis Tionghoa yang meninggalkan negerinya dan wilayah yang menjadi pilihannya adalah negara-negara di Selatan. (Dahana, 2000)

Pada tahun 1415 M, armada Tiongkok di bawah pimpinan Cheng Ho datang ke pulau Bintan. Armada ini kemudian singgah di pulau Bangka, Bliton, Karimata, Pulau Jawa di Semarang dan Madura. Muslim Tionghoa di Nusantara ada yang berasal dari imigran Muslim asal Cina lalu menetap di Nusantara. Ada pula yang memeluk Islam karena interaksi antar etnis Tionghoa yang sudah ada di Nusantara dengan mereka yang beragama Islam. Kedatangan imigran Muslim Tionghoa ke Nusantara sebelum dan pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara secara individu-individu. Kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara dari negeri Cina sebagian besar dengan cara kolektif (rombongan) beserta keluarga. Kedatangan Ceng Ho ini dianggap sebagai sebuah perjalanan yang berperan cukup penting, terutama dalam penyebaran agama Islam di sekitar Kepulauan Melayu (Nusantara). (Amirullah, 2023)

Setelah kedatangan Cheng Ho ke Nusantara, juru tulisnya yang bernama Ma Huan menyebutkan bahwa sudah banyak para pedagang Tionghoa yang bermukim di kota-kota pelabuhan di Nusantara. Selain itu, beberapa mubaligh terkenal yang tinggal di Jawa, atau yang lebih dikenal dengan nama Wali Songo, beberapa di antaranya memiliki darah keturunan Tionghoa, biarpun tidak pernah mempraktikkan kebudayaan Tionghoa lagi. Para wali tersebut antara lain adalah Sunan Bonang (Bong Ang), Sunan Kalijaga (Gan Si Cang), Sunan Ngampel (Bong Swi Hoo), Sunan Gunung Djati (Toh A Bo) mereka berasal dari Champa (kamboja/vietnam), Manila dan Tiongkok. Demikian juga Raden Patah (Cek Ko Po), sultan pertama kerajaan Islam Demak, adalah putra Kung Ta Bu Mi (Kertabumi), Raja Majapahit (Brawijaya V) yang menikah dengan putri Cina, anak pedagang Tionghoa bernama Ban Hong (Babah Bantong). (Sabrina, 2021)

Pelayaran Cheng Hoo juga memberikan satu era baru Islamisasi di Asia Tenggara, contohnya menurut Malay Annals, Cheng Hoo berperan penting dalam penyebaran Islam dalam komunitas orang China di Kepulauan Malaya, dia membuat satu struktur administrasi untuk mengelola komunitas orang Muslim China dan orang China perantauan di pulau Jawa dan Sumatera. Selama 1420-an, Cheng Hoo sendiri yang membuat perkembangan secara

signifikan dari semua komunitas orang Muslim China. Hal ini menunjukkan bahwa Cheng Hoo mempunyai ikatan kuat pada agama Islam sampai dia dewasa. Malah banyak orang Muslim di Asia Tenggara menganggap Cheng Ho sebagai pahlawan Muslim. Selama beberapa abad orang-orang Tionghoa terus bertambah jumlahnya, tapi tidak ada catatan yang jelas berapa jumlahnya diseluruh Nusantara. (Chandra et al., 2015)

Adrian Perkasa (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa keberadaan komunitas masyarakat yang beragama Islam di Ibu Kota Kerajaan Majapahit (Trowulan) juga dapat diketahui dari catatan yang ditulis oleh Ma Huan pada 1416. Yang menyebutkan bahwa paling tidak terdapat dua kelompok atau komunitas masyarakat Muslim yaitu, pertama, Komunitas Huihui Ren atau penduduk yang berasal dari Barat, dalam hal ini adalah orang Islam yang berasal dari kawasan China bagian Barat. Mereka berpakaian dan tinggal dengan layak. Kedua adalah Komunitas Tang Ren yang berasal dari China diantaranya dari Guangdong, Zhangzhou, dan Quanzhou yang mayoritas beragama Islam. Ma Huan menjelaskan bahwa kehidupan mereka sangat baik dan menjalankan ajaran Islam sesuai syariat. Catatan tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu telah tumbuh suatu komunitas masyarakat asing beragama Islam yang telah mapan. (Utami, 2017)

Kedatangan etnis Tionghoa dan Muslim Tionghoa dari negeri Cina ke Nusantara, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka, bukan tujuan menyebarkan Islam atau berdakwah. Pada umumnya mereka berasal dari daerah-daerah Zhangzhou, Quanzhou dan provinsi Guangdong. Tapi di zaman pemerintah Belanda pernah mendatangkan etnis Tionghoa ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan milik Belanda. (Amirullah, 2023)

pada tahun 1879 usaha perkebunan tembakau berkembang pesat sehingga ratusan ribu orang Tionghoa di selatan daratan Tiongkok di datangkan, mereka didatangkan oleh penjajah Hindia Belanda untuk dijadikan sebagai tenaga kerja murah, terampil, dan rajin (orang Hokkian). Setelah menyelesaikan kontrak kerja dari kolonial Hindia Belanda, mereka mulai berusaha untuk menetap di kota-kota dan lambat laun mereka bekerja sebagai perniaga, pemilik kedai, petani, nelayan dan penjual barang bekas, serta mereka berbaur dengan masyarakat pribumi. (Harahap, 2015)

Dalam perkembangan situasi politik di Hindia-Belanda, pemerintah Hindia-Belanda melarang etnik Tionghoa untuk berbaur terlalu dekat dengan orang-orang pribumi. Pada masa kolonial belanda, masyarakat Indonesia di bagi menjadi 3 kelompok dengan adanya kebijakan membagi masyarakat kedalam tiga kategori rasial, masing-masing dengan hak hukum dan istimewa yang berbeda-beda. Kelompok tersebut yaitu golongan Eropa berada di posisi teratas, Timur Asing (terutama Tionghoa, Arab dan India) berada di tengah-tengah dan orang pribumi golongan terendah.

Pengelompokan penduduk Indonesia pada masa Kolonial Belanda yang melarang orang Tionghoa untuk mempraktikkan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat pribumi, baik itu tradisi, adat istiadat, maupun agama membuat orang-orang Tionghoa yang sudah memeluk agama Islam secara otomatis mengalami penurunan derajatnya menjadi sama dengan penduduk

pribumi. Peraturan tersebut membuat kecenderungan di kalangan Tionghoa non-Muslim untuk tidak mengakui anggota keluarga mereka yang menganut agama Islam (Pahrozi, 2018). Karena, saat itu bagi mereka Islam dianggap identik dengan penduduk pribumi yang miskin, bodoh, dan terbelakang. Dampak lainnya, Tionghoa Muslim lambat laun tersingkir dari komunitas Tionghoa. Mereka lebih memilih berasimilasi dengan warga pribumi dan identitas ke-Tionghoa-an mereka pun hilang, dan dikelompokkan sebagai pribumi.

Keputusan memeluk Islam di kalangan etnik Tionghoa Indonesia tidak berhenti dan bahkan beberapa Tionghoa Muslim ikut terlibat dalam berbagai gerakan anti kolonial dan keagamaan ditingkat lokal. Pada abad ke 17, 18, dan 19 adanya istilah peranakan mengacu kepada Tionghoa Muslim. Karena sebelumnya etnik Tionghoa telah memantapkan diri mereka dan telah terjadi perkawinan dengan penduduk setempat. Oleh sebab itu, kebanyakan dari orang-orang etnik Tionghoa peranakan, yang lahir dari perkawinan-perkawinan itu akhirnya memeluk agama Islam (Sabrina, 2021). Etnik Tionghoa Muslim hidup dan berkembang sebagaimana etnik Pribumi lainnya di Nusantara. Gerakan dakwah Muslim Tionghoa bermula ketika pada tahun 1970 an H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien dan Kho Goan Tjin mendirikan sebuah organisasi yang bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) (Guyanie, 2018). Dari keberadaan organisasi PITI ini diharapkan dapat menjadi penyatu antara keberadaan etnis Tionghoa yang beragama Islam dengan penduduk pribumi yang mayoritas Islam dan etnis Tionghoa yang non-Muslim. Organisasi ini juga diharapkan menjadikan etnis Tionghoa Muslim tidak terasingkan lagi keberadaannya dan bisa menjadi alat pembauran di tengah keragaman masyarakat Indonesia.

2. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa di Kota Medan

Sejarah Tionghoa menyebutkan bahwa etnis Tionghoa sudah merantau dan menetap ke Nusantara sejak masa akhir pemerintahan Dinasti Tang. Daerah pertama kali didatangi ialah Palembang, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya mereka merantau ke pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat komoditi rempah-rempah. Kebanyakan dari mereka menetap di daerah sekitar pelabuhan pantai utara pulau Jawa, dan selanjutnya meneruskan kegiatan perdagangannya ke Pantai Timur Sumatera. (Amirullah, 2023)

Datangnya etnis Tionghoa di kota Medan dalam waktu yang berbeda-beda. Pertama kali pada para pedagang Tiongkok datang ke pelabuhan Sumatera Timur pada abad ke 15, dimana pada saat itu para pedagang dari Tiongkok datang dan berdagang meelalui sistem barter. Dimana aktivitas ini berjalan dalam waktu yang lama sehingga beberapa para pedagang Tiongkok memilih untuk tidak pulang melainkan tinggal di Sumatera Timur.

Selanjutnya gelombang kedua terjadi pada tahun 1863 pihak kolonial mulai menjalankan sektor perkebunan tembakau. Perkebunan tembakau berjalan dengan sangat baik, dan terus berkembang pesat sehingga diperlukannya banyak tenaga kerja untuk bisa bekerja di perkebunan tembakau. Para pengusaha kolonial yang berada di Pulau Jawa mengalami kerugian dalam jumlah besar, dan kerugian berlangsung secara terus menerus, sehingga membuat para pihak kolonial melirik dan tertarik untuk melakukan usahanya atau ekspansi

usahanya di luar Pulau Jawa, yaitu Sumatera Timur. Imigran Tiongkok datang ke Sumatera Timur mengikuti dengan dibukanya areal perkebunan tembakau dalam jumlah besar oleh para pihak kolonial. Namun masalah yang dihadapi para pengusaha kolonial saat melakukan ekspansi usahanya di Sumatera Timur adalah masalah tenaga kerja.



Gambar 3. Kuli Tionghoa dari Tiongkok tiba di Belawan menggunakan Kapal Yakub untuk bekerja di perkebunan Deli, Sumatera 1900

Sumber: Tembkaudeliblogspot.com



Gambar 4. Kuli Cina dan pengawasnya tahun 1870

Sumber: Tembkaudeliblogspot.com

Kemudian (2018:153) pihak kolonial sangat membutuhkan tenaga kerja sehingga manajer Maskapai Deli saat itu T.J. Cremer (1871-1873) mendatangkan tenaga kerja Tionghoa dari Penang untuk diperkerjakan sebagai buruh. Faktor ataupun alasan didatangkannya buruh Tionghoa dari penang adalah jaraknya yang lebih dekat ke Sumatera Timur daripada didatangkannya buruh Tionghoa dari Pulau Jawa. Ribuan buruh Tionghoa bersedia dan tertarik untuk datang karena pihak kolonial menjanjikan akan memberikan upah yang jauh lebih besar dan hidup yang lebih sejahtera atau lebih baik. Pihak Maskapai Deli juga mengimpor sekitar 4000 tenaga kerja dari Singapura ke Tanah Deli.

Terjadi dua gelombang migrasi besar etnis Tionghoa ke medan yaitu pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Dimana gelombang pertama yang datang adalah orang Tionghoa dan Jawa yang didatangkan dengan tujuan dipekerjakan menjadi kuli kontrak perkebunan. Gelombang kedua yang datang adalah orang-orang Aceh, Minangkabau, Mandailing yang

didatangkan dengan tujuan dipekerjakan menjadi guru, ulama, bahkan untuk berdagang. Buruh-buruh yang bekerja di Tanah Deli bukan hanya imigran-imigran yang berasal dari Penang dan Singapura akan tetapi sebagian juga diimpor langsung dari daratan Tiongkok, dimana salah satunya termasuk Tjong Afie yang berasal dari Guandong, datang ke Medan pada tahun 1875 yang saat itu masih 15 Tahun. (Pasaribu, 2021)

Tjong A Fie merupakan bukan seorang kuli namun seseorang yang bisa mencontohkan semangat kerja etnik Tionghoa di Deli dengan sangat baik sehingga dia telah memberikan kinerja yang luar biasa. Kemudian Tjong A Fie dipercaya oleh Sultan Makmoen Al Rasjid dari Deli untuk memberikan konsesi penyediaan atap nipah untuk gudang tembakau. Dari proyek pertama ini Tjong A Fie memiliki peluang bagus untuk mengembangkan perusahaannya. Lambat laun Tjong A Fie menguasai perdagangan opium di sekitar Deli hingga diizinkan membeli sebagian lahan tanah untuk perkebunan karet. Dari getah pohon karet yang ditanam Tjong A Fie, ia meraup untung yang lumayan ia menjadi seorang jutawan seiring dengan berkembangnya industri otomotif berlimpah ruah, ia menjadi jutawaan seiring berkembangnya industri otomotif dunia yang membutuhkan getah (Lateks) dari sejenis pohon karet yang sedang ditanam di Sumatera Timur.

Dalam kehidupan bermasyarakat Tjong A Fie dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, rendah hati, tegas dan disiplin. Pada saat membantu, sikap murah hati Tjong A Fie tidak memperhatikan asal-usul kebangsaan, agama dan ras. Kebaikannya dinikmati tidak hanya oleh etnik Tionghoa. Namun masyarakat di Sumatera Timur, pulau pinang, bahkan Tiongkok merasakan kebaikan hati Tjong A Fie. Saat Masjid Kesultanan Deli Al Mashun dibangun, Tjong A Fie menyumbang sepertiga dari total dana untuk pembangunan masjid yang indah. Untuk komunitas Tionghoa ia mendirikan klenteng, kuburan, dan tempat pemakaman. Untuk khalayak umum Tjong A Fie membangun rumah sakit penderita kusta di Sicanang serta membantu membangun gereja dan kuil Hindu.

Kontribusi sosial dan partisipasi Tjong A Fie sudah sangat membantu pemerintah kotapraja. Pada tahun 1911 atas dasar kepercayaan Sultan Deli, Tjong A Fie dilantik menjadi anggota Gemeenteraad dan penasihat pemerintah untuk urusan Tionghoa. Pada tanggal 8 Februari tahun 1921 Tjong A Fie meninggal dunia. Sampai saat ini dalam ingatan masyarakat medan kebaikan dan kehormatannya sebagai dermawan masih menyisahkan kesan yang baik. Bahkan diceritakan seperti sebuah legenda, para pendatang etnik Tionghoa dan orang Medan menghormatinya sebagai seorang dermawan. Dia adalah salah satu suku Tionghoa yang sukses, bersemangat dan pekerja keras. (Sabrina, 2021)



Gambar 5. Tjong A Fie, Kapten Tionghoa di Medan 1906

Sumber: KITLV

Pemerintahan Hindia Belanda (sejak permulaan abad ke-19) membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan: Eropa, Timur asing (Cina, Arab, India dan lain lain), dan pribumi. Posisi etnis Tionghoa pada masa kolonial Belanda yang berada di posisi kedua, merupakan posisi yang sangat strategis, sebab itu etnis Tionghoa diberikan keistimewaan oleh Belanda untuk tinggal di daerah-daerah pusat perdagangan dan bahkan disediakan pemukimannya tersendiri (Rusli & Arios, 2020). Sejalan dengan dibukanya usaha perkebunan karet sepanjang jalur Medan-Labuhan Batu pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda membuat blok-blok pemukiman terpisah menurut etnik. Sehingga terbentuklah hunian dengan nama Kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Keling, serta kawasan milik Tuan Kebon asal Eropa, sedangkan pribumi pendatang lain tinggal di luar blok Pemuka Rakyat Sultan (Amanda, 2016). Akibatnya terbentuk identitas dan karakteristik etnis Tionghoa itu sendiri yang enggan bergaul dengan lingkungan sekitar karena sistem sosial yang menjadi tertutup. Sehingga memunculkan stigma buruk, kecurigaan, prasangka (stereotipe) dari masyarakat pribumi terhadap masyarakat Cina (Tionghoa) hingga sampai saat ini tetap masih ada dan hal ini juga merupakan titik awal tumbuhnya sikap eksklusifitas etnis Tionghoa. (Andrie, 2016)

Keberadaan etnis Tionghoa di kota Medan bervariasi dan juga dalam jangka waktu yang berbeda. Masyarakat Tionghoa yang ada di Medan mayoritas orang-orang yang berasal dari suku Hakka, yang secara etimologis mempunyai arti yaitu tamu. Orang Hakka dikenal sebagai suku yang ulet bekerja dan terikat kuat dengan ikatan terutama dengan penutur dialek yang sama. Walaupun Etnis Tionghoa merupakan penduduk pendatang, akan tetapi kehadiran mereka di kota Medan akan sangat mudah kita tandai. Ini dapat dilihat melalui bahasa sehari-hari yang mereka gunakan serta rumah-rumah yang ada di jalan inti kota Medan tempat tinggal mereka yang juga sekaligus dijadikan sebagai tempat untuk membuka usahanya (Panjaitan, 2022), yang pada umumnya memang Etnis Tionghoa yang berada di kota Medan kebanyakan membuka usaha sebagai pedagang. Mereka dikenal sebagai pedagang yang sangat tekun dan ulet dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya.

Pemerintahan Hindia Belanda (sejak permulaan abad ke-19) membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan: Eropa, Timur asing (Cina, Arab, India dan lain lain), dan pribumi. Posisi etnis Tionghoa pada masa kolonial Belanda yang berada di posisi kedua,

merupakan posisi yang sangat strategis, sebab itu etnis Tionghoa diberikan keistimewaan oleh Belanda untuk tinggal di daerah-daerah pusat perdagangan dan bahkan disediakan pemukimannya tersendiri (Rusli & Arios, 2020). Sejalan dengan dibukanya usaha perkebunan karet sepanjang jalur Medan-Labuhan Batu pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda membuat blok-blok pemukiman terpisah menurut etnik. Sehingga terbentuklah hunian dengan nama Kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Keling, serta kawasan milik Tuan Kebon asal Eropa, sedangkan pibumi pendatang lain tinggal di luar blok Pemuka Rakyat Sultan (Amanda, 2016). Akibatnya terbentuk identitas dan karekteristik etnis Tionghoa itu sendiri yang enggan bergaul dengan lingkungan sekitar karena sistem sosial yang menjadi tertutup. Sehingga memunculkan stigma buruk, kecurigaan, prasangka (stereotipe) dari masyarakat pribumi terhadap masyarakat Cina (Tionghoa) hingga sampai saat ini tetap masih ada dan hal ini juga merupakan titik awal tumbuhnya sikap eksklusifitas etnis Tionghoa. (Andrie, 2016)

Kelompok masyarakat Tionghoa dikota Medan cenderung bertempat tinggal di pusat kota atau pusat perdagangan. Mereka lebih senang tinggal di tempat usahanya yang cukup ramai dan dekat dengan keluarganya. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pemukiman eksklusif kelompok-kelompok etnik di kota berfungsi sebagai “kepompong” atau yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai benteng etnik. Orang Tionghoa yang keluar dari pemukiman Cina (Chinese Quarter) tersebut dianggap sebagai pembelotan dari jaringan sosial mereka. Dengan demikian, suasana etnik dan ras (ethnic race-spaces) di perkampungan etnik tersebut menguatkan kecendrungan segregasi atau pemisah diri dari kelompok lain. Sekolah dan pusat-pusat rekreasi kelompok etnis Tionghoa lebih banyak didirikan di tengah perkampungan Tionghoa di kota Medan. Gejala segretif ini sangat terlihat terutama dalam kawasan-kawasan pemukiman elit dengan suasana komersial yang pekat dan dengan tingkat homogenitas yang tinggi. (Warganda, 2018)

Pemukiman etnik Tionghoa melindungi kawasan elite dengan model rumah khas berupa rumah hunian dua lantai (permanen) yang berfungsi ganda. Lantai dasar digunakan sebagai toko dan lantai atas digunakan sebagai rumah. Dinding kiri dan kanan ruko menempal pada dinding rumah tetangga dan dibangun berjajar di sisi jalan yang mengikuti jalan utama kota. Toko itu berada di seberang toko. Jalan-jalan distrik (desa) etnik Tionghoa juga diberi nama dengan nama khas Tionghoa seperti Canton Street, Kapiteinsweg (Jalan Kapiten), dan Jalan Hakka. Dalam konsep pengamanan blok hunian bagi masyarakat etnik Tionghoa yang berupa pertokoan bertingkat yang dibangun memanjang karena berdekatan dan memiliki fungsi tersendiri, jajaran pertokoan itu berfungsi sebagai benteng pertahanan sekaligus perlindungan. Maka sangat mudah untuk mengidentifikasi wilayah etnik Tionghoa.

Di Medan jumlah perkampung etnik Tionghoa lebih banyak daripada golongan timur asing lainnya. Di Medan, daerah yang dikenal sebagai perkampung etnik Tionghoa adalah Kampung Baru, Kesawan dan Pasar Ikan, Glugur, Pulo Brayon, Labuhan, Belawan, Titipapan, dan Sunggal. Diperkampungan tersebut, pemukiman Tionghoa berkembang dengan baik dengan nuansa Tionghoa yang kental. Setiap kampung di kota ini memiliki gerbang besar yang dihiasi dengan tulisan aksara Tionghoa, patung naga, singa penjaga, lampion kertas dan hiasan lainnya. Semua ornamen dan hiasan dipadukan dalam nuansa merah khas Tionghoa. Pasar, kompleks pertokoan, persimpangan jalan besar tempat perkampung etnik Tionghoa berada

semakin indah dengan keberadaan gerbang kampung tersebut. Dalam nuansa lain, hal ini juga terjadi di kampung India dan Arab.

Pemisahan, pengelompokan dan pembedaan status sosial, pekerjaan dan pemukiman berdasarkan etnik di Medan merupakan gejala bahwa pendatang tidak berasimilasi dengan budaya lokal. Kelompok pendatang di Medan masing-masing hidup berdampingan, tetapi mereka tidak bercampur atau bahkan terpecah-pecah, meskipun mereka hidup dalam lingkungan sosial yang sama. Situasi ini membentuk sebuah tatanan sosial yang khusus dan menyebutnya dengan istilah “masyarakat majemuk” (Sabrina, 2021). Sedangkan etnik Tionghoa yang sudah memeluk Islam mereka tidak memiliki pengelompokan atau perumahan khusus, karena etnik Tionghoa yang memeluk Islam sudah hidup berbaur dengan siapa saja.

3. Muslim Tionghoa di Kota Medan

Adapun faktor-faktor pendorong atau yang melatarbelakangi yang membuat masyarakat Tionghoa di kota Medan tertarik untuk menganut agama Islam yaitu dari adanya keinginan individu, pernikahan dan keturunan.

a. Keinginan Individu

Masyarakat Tionghoa yang memilih untuk menganut agama Islam salah satu faktornya yaitu dari keinginan diri sendiri. Artinya, seorang Tionghoa memilih menjadi islam karena dorongan dari diri sendiri, karena menganggap agama islam dapat menuntunnya untuk menjadi lebih baik. Sesuai firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 256 yaitu *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ*

“tidak ada aksaan dalam menganut agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat”.

Datangnya agama Islam tampak sudah jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Sehingga tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman. Sebab, iman adalah keyakinan dalam hati. Memeluk agama Islam sebagai keyakinan yang timbul karena adanya kenyamanan dalam diri sendiri yang membuat para etnik Tionghoa semakin dekat dengan Islam. Dengan secara sadar memilih untuk menerima Islam sebagai identitas keagamaan baru.

Menurut seorang informan yang menceritakan mengenai latar belakangnya dalam memeluk agama Islam berdasarkan keinginan dari diri sendiri ketika beliau mempelajari Islam secara individu. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu informan Bapak Ali, mengatakan bahwa

“...saya terlahir tidak Islam. Bapak saya menikah dengan Ibu saya yang non Islam. Jadi waktu SMA saya masuk Islam dapat fitrah dari Allah kembalilah saya ke fitrahnya. Jadi saya itu Tionghoa campuran, buyut saya jawa dan kakek saya dari Tionghoa. Saya terlahir agama Budha. Waktu SMP saya sekolah Islamiah, jadi ada mata pelajaran Islam dan walaupun orang Cina harus belajar agama Islam juga, dari situlah saya belajar-belajar dan tertarik dengan Islam. Jadi saya membaca kisah-kisah para Nabi sampai waktu istirahat sekolah pun saya pergi ke perpustakaan dan sangat tertarik dan terharu membaca

kisah-kisah tokoh-tokoh Islam dan karna saya masih SMP belum ada keberanian untuk memeluk Islam dan sampai SMA saya tidak tahan lagi akhirnya saya mengomong ke guru agama saya dan akhirnya saya memeluk agama Islam dan memutuskan untuk sunat”.

Oleh karena itu Bapak Ali yang awalnya non muslim dan memilih menjadi Islam dikarenakan dorongan dari diri sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Beliau memeluk agama Islam karena adanya kenyamanan dalam diri sendiri yang dapat menuntunnya menjadi lebih baik.

b. Pernikahan

Faktor pernikahan yang dimaksud adalah karena memilih agama dan menjadi Islam karena pasangan hidup mereka. Hal ini tentunya bukan merupakan pilihan yang mudah bagi mereka karena harus berpindah keagama yang lainnya (Islam). Pilihan ini kerap menimbulkan masalah dalam keluarga, misalnya akibat tidak direstunya pernikahan itu mereka kemudian di buang dari keluarga. Hal ini sesuai dengan keyakinan warga Tionghoa yang beragama Budha yang mengatakan bahwa apabila mereka berpindah agama terutama agama Islam, mereka akan mendapatkan kesialan dan akan jatuh miskin.

Menurut seorang informan yang menceritakan mengenai latar belakangnya dalam memeluk agama Islam dikarenakan keinginan untuk menikah. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu narasumber bernama Ibu Hj. Lilie Swandie (15 November 2023) mengatakan bahwa

“...saya mempelajari Islam tahun 1975 tapi benar-benar dan masuk Islamnya tahun 1977 dan dikarenakan saya mau menikah. Sebelumnya kebetulan suami saya orang sini dan beragama Islam. Diam-diam saya mempelajari islam. Hal itu membuat orang tua saya menantang keras dan saya hampir di usir dari rumah. Walaupun begitu tidak membuat saya mundur dan saya juga mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya tidak minta apa-apa karena ini kemauan saya sendiri dan ditahankan sendiri liku-liku hidup yang susah ini. Dan sampai akhirnya orang tua saya mulai luluh dan menerima saya sebagai seorang muslim”.

Dapat disimpulkan bahwa, Ibu Lili masuk Islam dikarenakan ingin menikah dan mengikuti agama pasangannya yaitu Islam. Keputusan tersebut ditantang keras dan mendapatkan ancaman dari orang tuanya, namun hal tersebut tidak membuat beliau mundur dari keputusannya untuk menikah dan menjadi seorang muslim. Bertahun-tahun setelahnya, akhirnya orang tua beliau dapat menerima keadaan dan kondisi dari Ibu Lili sebagai seorang muslim.

c. Keturunan

Keturunan adalah salah satu alasan untuk semua orang meneruskan garis keturunan dari orang tua. Terutama dalam hal keagamaan. Agama adalah suatu kepentingan untuk dapat membimbing manusia untuk menjadi lebih baik. Garis keturunan agama dari orang mengharuskan setiap anak atau setiap keturunan harus mengikuti agama dari orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu informan Bapak Ihsan, mengatakan bahwa "...saya merupakan Tionghoa muslim sejak lahir. Jadi orang tua saya sudah memeluk Islam. Ibu saya melayu dan bapak saya orang tionghoa jadi saya lahir emang sudah beragama Islam".

Selama ini masyarakat Tionghoa di kota Medan dikenal sebagai masyarakat yang eksklusif dan membatasi pergaulan dengan masyarakat pribumi. Akan tetapi saat mereka menjadi muslim, hubungan sosial dengan masyarakat pribumi, dapat terjalin dengan baik dan mereka dapat hidup secara berdampingan. Dalam Islam telah diajarkan bahwa (Al-Qur'an Surah Al-Hujarat: 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal satu sama lain".

Hal Ini membuktikan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari segala ras, baik itu berkulit putih, hitam, Allah tidak membeda-bedakan segala ciptaannya, Allah memandang sama dan sederajat. Konsep ajaran agama Islam yang tidak membeda-bedakan suku, warna kulit menjadikan mereka dapat berbaur dengan masyarakat. Respon masyarakat Medan yang dikenal bersifat majemuk, ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan. Masyarakat kota Medan dapat menerima masyarakat Tionghoa Islam dengan baik dan dapat berbaur dengan mereka. (Amanda, 2016)

4. Muslim Tionghoa di Kota Medan pada Tahun 1998

Gerakan reformasi tentang kerusuhan tahun 1998 diawali di kota Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 30 April 1998 dimulai unjuk rasa dari kalangan mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Medan dengan tuntutan agar segera dilakukan reformasi di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Para Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kampus masing-masing dan meluas sampai ke kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumatera Utara. Adapun kampus-kampus yang mengikuti unjuk rasa tersebut yakni, AMIK Kesatria, STIKP, UMSU, ITM, UNIKS, UMA, IAIN Sumatera Utara, dan IKIP Negeri Medan. Dari mulai mendirikan mimbar bebas, pemajangan pamflet tuntutan, sampai terlibat aksi lempar-lemparan dan bentrokan dengan aparat keamanan yang berjaga di depan kampus.

Aksi meluas pada tanggal 1 Mei 1998, terjadi 2 aksi besar-besaran di kota Medan. Aksi pertama dimulai oleh Mahasiswa UISU. Sekitar pukul 09.00 wib, mereka berkumpul di depan kampus dan bersiap melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Upaya mediasi yang dilakukan bersama pihak aparat tidak menemui hasil dan pasukan huru-hara telah bersiap di jalan Pelangi dan jalan Sisingamangaraja. Aksi dorong-dorongan terjadi dan pihak aparat kemudian melakukan aksi refresif berupa pemukulan dan tembakan Gas Air Mata kepada para mahasiswa yang menyebabkan mereka mundur kembali ke wilayah kampus UISU. Bahkan di dalam kampus Mahasiswa kemudian melempari petugas yang masih menembakkan gas air mata dengan batu dan membuat petugas keamanan mundur dari depan kampus. Aksi berlanjut pada siang hari, mahasiswa dibantu para pelajar SMA membakar satu unit sepeda

motor yang terparkir di depan kampus. Aksi baru mulai mereda menjelang sore hari. (Hidayatullah, 2020)



Gambar 6. Ratusan mahasiswa UISU diblokir aparat keamanan saat menuju Gedung DPRD Sumut.

Sumber: Waspada, 2 Mei 1998, melalui sumber internet Indoprogres.com

Sedangkan di kampus lain yaitu, Universitas HKBP Nommensen yang berada di jalan Sutomo aksi bersinambung sampai sore hari. Di dekat kampus tersebut terdapat rumah penduduk, toko, gedung perkantoran, Outlet (KFC), serta hotel Sahid Angkasa hadapi kehancuran kaca-kaca bagian depan sebab terserang lemparan batu dari dalam kampus. Tidak bisa dihindari aksi saling membalas lemparan juga terjalin. Dampak dari tindakan unjuk rasa mahasiswa tersebut setidaknya 200 toko serta perkantoran di sebagian kawasan kota Medan terpaksa tutup dan memberhentikan aktivitasnya. (Purba, 2018)

Keesokan harinya, gabungan massa aksi dari Mahasiswa Universitas HKBP Nonnensen, pelajar, dan juga warga sekitar bergerak menuju arah pertokoan dan showroom mobil, kemudian mereka mengeluarkan dan membakar mobil, melempari kaca toko dengan batu. Kaca Hotel Elbrura dan Juga KFC yang berada di lokasi sekitar kampus tidak luput dari lemparan batu tersebut. Kemudian juga pihak kampus mengambil tindakan dengan meliburkan perkuliahan sampai keadaan kampus kembali kondusif.

Pada tanggal 3 Mei 1998, Poltabes Medan melakukan razia dan menjaring ratusan mahasiswa, pelajar, dan warga yang diduga ikut dalam aksi demonstrasi. Aksi disusul mahasiswa dari kampus IKIP pada 4 Mei diawali di dalam kampus dan melibatkan sekitar 500-an orang massa aksi dari kalangan Mahasiswa. Kemudian aksi meluas dengan mencoba menerobos pihak keamanan yang sudah berjaga di depan kampus. Aksi dorong-dorongan antar mahasiswa dan pihak keamanan tidak dapat dihindari dan terjadi lempar-lemparan batu, ketapel, dan juga bom molotov. Mereka membakar ban dan kayu di depan kampus untuk menghindari pasukan huru-hara yang semakin banyak dan bergerak ke arah dalam kampus.

Menjelang habis maghrib keadaan mulai mereda, beberapa mahasiswa mulai memberanikan diri keluar dari kampus. Namun mereka di sambut polisi di depan gerbang untuk di amankan. Polisi membentak mereka, laki-laki disuruh jalan jongkok dan perempuan mendapat pelecehan seksual dimana payudara dan pantat salah seorang mahasiswi diremas oleh polisi. Warga yang melihat tindakan polisi saat mengamankan Mahasiswa menjadi geram dan kemudian menggabungkan diri dan membentuk sekutu. Malam harinya massa aksi

mendatangi pos polisi dan mencari polisi yang melakukan tindakan pelecehan tersebut, namun massa aksi tidak menemukan oknum polisi tersebut. Massa aksi yang memanas menyebabkan pihak polisi meminta bantuan kepada Polsekta Percut Sei Tuan. Kemudian mereka membakar truk, sepeda motor dan apapun yang ada di pos polisi. Massa aksi kemudian bergerak menuju pusat pertokoan di sekitar jalan pancing. Dari mulai membakar ban, merusak tokotoko, dan penjarahan isi toko dilakukan.



Gambar 7. Pecah kaca depan truk pasukan anti huru-hara akibat lemparan batu dalam aksi unjuk rasa di kampus IKIP Medan, Jalan Pancing, Senin, 4 Mei 1998.

Sumber: Waspada, 4 Mei 1998, melalui sumber internet Indoprogress.com

Pada lain tempat, yakni di Jalan Moh. Yamin juga mengalami hal serupa salah satunya Buana Plaza. Di Jalan Letda Sujono, massa membakar sebuah truk, sepeda motor, ruko, dan pick up milik polisi. Kemudian di jalan M. Yakob, rumah dihancurkan kemudian warga menjarah barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Serta di Jalan Buluh Perindu warga membakar dua unit mobil, Aksara Plaza dan toko-toko di sekitar tidak luput dari aksi penjarahan. Polisi melakukan tindakan pembubaran dan massa aksi terpecah sebagian menuju Rumah Sakit Pringadi, dan ada yang bergerak menuju Sukaramai dan kerusuhan berlangsung sampai dini hari.

Pusat-pusat perbelanjaan seperti Deli Plaza, Perisai Plaza, Medan Plaza, Medan Mall, Pusat Pasar, Medan Baru Plaza, tutup total dan menyebabkan perekonomian di Kota Medan lumpuh. Bahkan di sepanjang pusat-pusat pertokoan di medan yakni di Jalan Thamrin, Cirebon, Semarang, Gatot Subroto, Yos Sudarso, HMYamin, SM Raja, Pemuda, tidak ada satupun toko yang buka dan berjualan. Sementara di Pelabuhan Belawan, truk-truk yang mengangkut barang tidak berani meninggalkan Pelabuhan dan bergerak menuju Medan.



Gambar 8. Lantai dasar Plaza di Jalan Aksara Medan yang hancur berantakan akibat dilempari massa pada Senin, 4 Mei 1998, malam.

Sumber: Waspada, 5 Mei 1998, melalui sumber internet Indoproggress.com

Pada tanggal 6 Mei 1998, kerusuhan makin melebar dan meluas di Kota Medan. Kerusuhan, pelemparan, pembakaran, dan pembakaran ruko terjadi di Pulau Brayan, Glugur/Jalan Sutomo, Kampung Baru/Brigjen Katamso, Titi Kuning, Jalan Sampali, Jalan Krakatau, Kampung Lalang, Kampung Madras/Jalan Zainul Arifin, Mandala By Pass, Simpang Limun/Jalan Sisingamangaraja, Tanjungsari, dan Martububung. Kemudian di Simpang Limun, terdapat dua Studio yang di hancurkan oleh massa aksi beserta menjarah toko-toko di sekitarnya. (Hidayatullah, 2020)

Dari berbagai tempat itu kerusuhan ini diberitakan korban yang mati lima orang. Empat diantara lima korban tersebut telah tewas terbakar di ruko pada hari Selasa 5 Mei di Jalan Sutrisno. Empat korban itu merupakan tiga orang masyarakat generasi etnik Tionghoa yang tidak dikenal identitasnya serta seseorang anak muda yang berusia 13 tahun berkedudukan di jalan Brigjen Katamaso. Sebaliknya seseorang pemuda yang marga Sihotang berkedudukan perumnas Mandala yang tewas sebab terjadi kerusuhan di Mandala serta delapan puluh orang luka terserang tembak. Kebanyakan korban yang terluka berasal dari pelajar serta mahasiswa apalagi masih ada yang duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bertepatan tanggal 8 Mei nampaknya pertokoan mulai buka. Secara perlahan kondisi kota Medan berjalan normal. Dipusat kota Medan tidak ada lagi kerusuhan. Pada saat terjadinya kerusuhan tersebut pedagang dari generasi etnik Tionghoa takut membuka toko. Perihal ini tidak begitu dengan masyarakat pribumi mereka senantiasa tetap berdagang. Di depan toko nampak tulisan kepunyaan pribumi, usaha Muslim. Warga merasa takut di daerah pinggiran Medan seperti Belawan, Martubung, Marelan penjarahan terjadi. Dari daerah itu dua puluh lima terdakwa pelakon penjarahan berhasil ditangkap petugas keamanan beserta benda fakta hasil jarahannya. Selain itu sampai pada tanggal 9 Mei perusahaan, industri, maupun toko banyak yang belum buka sehingga ribuan karyawan tidak dapat bekerja. Mengingat banyaknya pabrik serta toko yang terbakar munculah kekhawatiran karyawan kehilangan pekerjaan. (Purba, 2018)

Di kota Medan jalanan selalu ramai dari aksi unjuk rasa semenjak 4 Mei kemudian kerusuhan mulai berhenti tanggal 8 Mei. Suasana kota yang terus membaik membuat masyarakat generasi Tionghoa belum merasa tenang. Beberapa dari mereka pergi dengan alasan keamanan dan hendak kembali apabila suasana telah aman. Mereka memilah berangkat ke luar negara arus keberangkatan melalui kapal laut serta pesawat malah meningkat. Pelabuhan Belawan hadapi lonjakan penumpang yang melakukan pelayaran ke Penang, Malaysia. Pemohonan paspor di kantor imigrasi kelas I serta kantor imigrasi Polonia setelah kerusuhan mengalami kenaikan. Mayoritas pemohon itu merupakan masyarakat etnik Tionghoa. Sebaliknya orang Tionghoa yang tinggal di wilayah pinggiran Medan semacam Percut Sei Tuan, Tembung, Lubuk Pakam memilah mengungsi ke tempat famili di pusat kota Medan sebab tidak mempunyai uang yang cukup buat berangkat ke luar negara. Adapun sebagian memilah tetap tinggal di hotel pusat kota, hotel jadi opsi utama sebab relatif lebih

nyaman. Keadaan nyaman serta terkontrol ini tidak terlepas dari aktivitas Siskamling Swakarsa yang diterapkan masyarakat di beberapa tempat di Medan.

Namun pada 14 Mei tersebar isu bahwa kerusuhan terjadi lagi. Hal ini bukan hanya membikin warga panik namun pula menyusahkan pihak keamanan sebab harus mengumpulkan anggotanya ke segala tempat yang sudah beredarnya isu itu. Aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi lagi mereka memaksa reformasi segera dilakukan. Sikap mogok makan dilakukan oleh Mahasiswa Unika St Thomas, mereka tidak bakal menyudahi sebelum paksaan reformasi yang diperjuangkan tercapai. Sedangkan dari Universitas Darma Agung serta Institut Sains Teknologi Pardede, lima puluh mahasiswa menyampaikan sikap kesedihan dan mengatakan turut berdukacita atas peristiwa berdarah Trisaksi dengan menyiapkan mimbar leluasa didepan walikota medan. Aksi mimbar leluasa juga dilakukan di kampus Universitas Nomsen yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan mereka memaksa reformasi harus cepat dilakukan serta menyumpahi sikap penembakan sampai menimbulkan tewasnya 6 mahasiswa Trisaksi dalam kejadian 12 Mei 1998 di Jakarta.

Tindakan yang dilakukan mahasiswa UISU sebagai bentuk belasungkawa atas terjadinya insiden trisakti mereka melakukan aksi menaikan bendera hitam tepat bersebelahan dengan bendera merah putih. Kemudian pihak kampus UISU juga berharap kepada mahasiswa untuk terus menyuarakan reformasi. Mahasiswa bersama beberapa dosen dari Universitas Sumatra Utara (USU) menyelenggarakan aksi damai di DPRD Sumatera Utara pada tanggal 16 mei. Sepanjang aksi tersebut mereka memerintahkan setiap instusi dan bank untuk segera memasang bendera merah putih dikibarkan setengah tiang didepan setiap instansi. Perihal ini mereka lakukan sebagai bentuk bahwa rakyat Indonesia sedang berbelasungkawa dikarenakan peristiwa meninggalnya beberapamahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta dalam memperjuangkan reformasi. Kampanye awal mulanya berlangsung secara teratur mereka memohon agar MPR dapat bersikap tegas dalam memutuskan kebijakan tentang mundur tidaknya Soeharto. Tidak hanya itu mereka juga menekan persidangan istimewa lekas dilakukan.

Beberapa saat hari kebangkitan Nasional di Peringati banyak masyarakat Medan dari generasi Tionghoa memilah meninggalkan kota yang mulai memanas sebab tersebar isu hendak terdapat lagi gerakan massa serta memenuhi lapangan terbang Polonia. Jalur keberangkat keluar negara tidak hanya melewati bandara tetapi juga meningkat di Pelabuhan belawan. Kemudian pada 21 Mei presiden Soeharto memberitakan mengundurkan diri menjadi Presiden lalu yang mengantikannya ialah B.J.Habibie. Masyarakat Tionghoa serta masyarakat lainnya yang memilah berangkat keluar negara pada saat kerusuhan telah beranjak kembali ke Medan. Pada 23 Mei di pelabuhan Belawan sebagian kapal dari Penang ataupun Batam membawa penumpang sebanyak 488 orang kemudian hari berikutnya dengan jumlah 925 orang datang ke Belawan dari Penang serta Batam. Setelah ini merupakan masa yang diketahui dengan istilah era Reformasi.

Terkait dengan Tionghoa Muslim pada tahun 1998 mereka yang sudah diketahui sebagai Muslim akan diperlakukan sepenuhnya sebagai bagian dari etnik mayoritas. Banyak dari etnik Tionghoa yang membuat tulisan didepan toko-toko mereka yang ditulis dengan kata "Milik

Pribumi”, “Milik Muslim” untuk dapat mengamankan properti mereka dari penjarahan dan pembakaran. Namun, beberapa Tionghoa Muslim pemilik Toko mengatakan bahwa mereka juga merasakan sasaran tersebut, meskipun mereka menyebutkan bahwa mereka adalah Muslim. Ternyata masih ada pertanyaan apakah mereka muslim “Pribumi” atau Muslim “nonpribumi”. (Sabrina, 2021)

5. Interaksi Sosial Muslim Tionghoa di Kota Medan

Masyarakat Tionghoa yang sudah memeluk Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka jadi lebih mampu bersosialisasi dengan masyarakat pribumi yang sama-sama merupakan etnis pendatang yang menetap di kota Medan. Interaksi tersebut dapat kita lihat dari beberapa bidang. Berikut adalah penjelasan dari interaksi sosial masyarakat Tionghoa sesudah memeluk agama Islam.

a. Bidang Ekonomi

Mengenai mata pencaharian masyarakat Tionghoa adalah berdagang. Mata pencaharian adalah salah satu kepentingan dalam hidup untuk dapat menunjang kebutuhan perekonomian sehari-hari. Jiwa dagang yang telah melekat pada masyarakat Tionghoa tidak akan bisa lepas dan akan tetap melekat pada diri mereka. Bahkan sampai saat ini ketika melihat pedagang dari Etnis Tionghoa terlintas slogan mereka yakni “biar untung sedikit yang penting laris”. Kemudian kelebihan lainnya, masyarakat etnis Tionghoa dalam hal berdagang selain ulet dan rajin juga terkenal ramah. Hal tersebut menyebabkan usaha yang dijalani masyarakat etnis Tionghoa lebih cepat berkembang dan bertahan karena harga yang mereka tawarkan cenderung lebih murah dengan kualitas yang sama seperti yang dijual pedagang lainnya. Berbagai produk yang dijual oleh pedagang masyarakat etnis Tionghoa mulai dari kebutuhan pokok seperti produk sandang dan pangan, barang-barang elektronik, dan masih banyak lainnya. Peran etnis Tionghoa baik dalam melakukan perdagangan maupun berinteraksi sosial didalam kehidupan sehari-hari menyebabkan seringkali terjadinya kecemburuan sosial yang dialami warga dari etnis lain karena adanya keekklusifan yang dibangun dan didapatkan pihak etnis Tionghoa. (Hidayatullah, 2020)

Dalam tulisan Effendi Setiawan (2018:93) yang berjudul Tionghoa Medan Komunitas Paling Kontroversial di Indonesia menyatakan bahwa dalam bidang ekonomi, Sebagian besar bagi masyarakat Tionghoa di kota Medan berdagang sama halnya seperti menjadi panggilan hidup. Kota Medan ada banyak berbagai macam etnis yang sangat terkenal akan kemampuannya dalam hal berdagang antara lain suku Batak Toba, Karo, Padang, dan tentu saja tidak ketinggalan etnis Tionghoa. Selama era 1960-an hingga 1980-an, pilihan yang paling terbuka lebar dan masuk akal untuk meniti hari depan bagi Tionghoa Medan adalah menjadi pedagang. Memang ada beberapa yang memilih untuk berprofesi menjadi dokter, pengacara, akan tetapi jumlah sedikit. Ini karena Tionghoa Medan, yang dimana bukan menjadi rahasia lagi, bahwa untuk sangat dibatasi untuk masuk ke Perguruan Tinggi, sementara peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi Polri/TNI juga nyaris tidak ada, memang ada Tionghoa Medan yang menjadi Pegawai Negeri Sipil akan tetapi jumlah sedikit. oleh karena itu Pedagang merupakan pilihan profesi yang paling mudah dan rasional.

Selanjutnya dalam buku Effendi Setiawan (2018:93) menyatakan bahwa era reformasi, peluang untuk bekerja ataupun berkarir di pemerintahan lebih mudah dan terbuka, akan tetapi anak-anak muda Tionghoa Medan yang yang tumbuh dan berkembang tanpa persiapan mental menjadi PNS, TNI atau Polri, lebih tertarik untuk menjadi seorang wiraswasta atau profesi yang lainnya. Bahkan kebanyakan anak-anak muda Tionghoa Medan diarahkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnis orang tua mereka. Perdagangan di kota Medan banyak dikuasi oleh etnis Tionghoa, mulai dari pusat perbelanjaan mewah, pertokoan, hingga pasar tradisional. Kawasan seperti marelan saat ini banyak berjejer bangunan-bangunan ruko yang menjadi tempat bisnis warga Tionghoa.

Secara Umum Tionghoa Medan memang memiliki bakat berdagang. Tionghoa Medan dikenal sebagai orang yang ulet, gigih, tekun, dan pantang menyerah. Ciri khas lainnya pengusaha Tionghoa Medan ialah memiliki sifat agresif, kreatif, banyak akal dan berani berspekulasi. Pengusaha Tionghoa Medan berani mengambil resiko dalam mengembangkan bisnisnya. Bagi pengusaha Tionghoa medan mereka sangat menjunjung tinggi *sin liong*, yang dimana artinya adalah kepercayaan yang dimana azas ini banyak dipraktikan oleh Tionghoa Medan di dalam bisnis mereka. Warga Tionghoa Medan juga dikenal sebagai pedagang yang gigih dan setia menekuni bisnisnya, mereka sudah banyak mengusahakan dagangannya selama puluhan tahun, sehingga mereka sudah sangat mengerti dan menjadi ahli yang menguasai bisnis tertentu sampai sedetail-detailnya dan sulit disaingi. Muslim Tionghoa juga tidak jauh berbeda dengan orang Tionghoa non muslim dimana sebagian besar memiliki usaha. (Pasaribu, 2021)

b. Bidang Sosial Kebudayaan

Dalam bidang sosial dan Budaya, Etnis Tionghoa Medan memiliki kespesifikan atau ciri khas tersendiri sama halnya seperti kota Medan yang juga memiliki kespesifikan sendiri dalam banyak aspek kehidupan. Menurut pandangan dari buku yang ditulis oleh Adrian Perkasa (2012:10) dalam bukunya yang berjudul *Orang-Orang Tionghoa & Islam di Majapahit* menyatakan bahwa Komunitas Tionghoa Muslim banyak yang menghuni wilayah pesisir Jawa. Banyak Tionghoa Medan memilih tinggal berkelompok di kawasan-kawasan tertentu, yang dimana hal ini membuat mereka sering dicap sebagai masyarakat yang eksklusif dan tidak mau berbaur. Sebagian besar pemukiman etnis Tionghoa Medan berada di inti kota dan beberapa di kawasan real estat. Di inti kota masyarakat Tionghoa Medan banyak tinggal di ruko (Rumah Toko) yang memiliki fungsi sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal (Sabrina, 2021). Akan tetapi sekarang ini ruko hanya dijadikan warga Tionghoa Medan sebagai tempat usaha, dimana alasannya adalah keamanan dan kenyamanan. Menurut pandangan dari buku yang ditulis oleh Onghokham (2005:32) dalam bukunya yang berjudul *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa terdapat di banyak negara. Orang-orang Tionghoa di tiap-tiap negara mempunyai cara hidup berbeda dengan penduduk di negara-negara itu sendiri.

Dalam tulisan Effendi Setiawan (2018:77) yang berjudul *Tionghoa Medan Komunitas Paling Kontroversial di Indonesia* menyatakan bahwa sekarang ini warga Tionghoa Medan memilih untuk tinggal di kompleks-kompleks pemukiman. Kompleks -kompleks pemukiman Tionghoa Medan terbagi atas beberapa kelas yaitu elit, menengah, dan sederhana. Khusus real

estat elit berada di kawasan Polonia, dimana yang paling terkenal adalah Taman Malibu Indah yang mana hampir semua penghuninya merupakan etnis Tionghoa. Kompleks yang lebih baru yang juga berdekatan dengan kawasan polonia seperti, Grand Polonia, The Palace Residence, River View, dan City View. Di kawasan Medan Barat, ada perumahan elit Griya Riatur Indah seluas 30 hektar. Di kawasan Jalan Pancing, juga bermunculan kawasan pemukiman mewah baru yang sebagian besar dihuni oleh kalangan Tionghoa, antara lain, Citraland Bagya City, dan Mutiara Residence. Lalu di jalan Jamin Ginting ada Citra Garden dan Royal Sumatera. Di jalan cemara yang juga termasuk kawasan Deliserdang, terdapat real estat yang sangat terkenal yakni Cemara Asri. Ditambah dengan banyaknya bisnis kuliner di komplek itu sehingga menambah minat menerima para pindahan dan penghuni baru untuk tinggal disana.

Pada malam menjelang Imlek atau cap go meh, jalanan di kawasan itu bakal ramai dan macat karena banyaknya pengunjung atau orang di kawasan tersebut sehingga dikenal sebagai area Chinatown. Selain Cemara Asri, kawasan lain di Medan yang dianggap Chinatown adalah Asia Mega Mas, dimana banyak etnis Tionghoa yang tinggal disana dan juga membuka usaha disana. Untuk perumahan kelas menengah ada kompleks The Piazza di jalan Gaperta, Platinum Garden di jalan Brigjen Katamso, serta jalan KL Yos Sudarso di kawasan Pulo Brayon terdapat banyak jalan-jalan kecil dimana banyak berderet rumah-rumah Tionghoa. selama dasawarsa terakhir semakin banyak Tionghoa Medan yang memilih tinggal di kompleks pemukiman dimana ada pintu gerbang besar yang dijaga satpam. (Pasaribu, 2021)

Masyarakat Tionghoa Muslim yang ada di kota Medan berbeda dengan masyarakat Tionghoa Medan yang non muslim yang memilih untuk tinggal di kompleks-kompleks perumahan atau pemukiman, sedangkan Tionghoa Muslim lebih memilih untuk tinggal di pemukiman-pemukiman yang biasa dan sederhana yang dimana juga di dalam pemukiman tersebut orang-orang yang tinggal disana tidak hanya beretnis Tionghoa tapi juga etnis lainnya dan di sebuah pemukiman padat yang sederhana, apalagi salah satu faktornya adalah finansial. Dimana sebagian besar masyarakat muslim Tionghoa di kota Medan tingkat pendapatannya adalah menengah kebawah sehingga tidak dapat tinggal di komplek atau perumahan-perumahan khusus karena membutuhkan biaya yang mahal. Namun ada juga Tionghoa muslim yang juga tinggal di perumahan elit akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak Tionghoa non muslim. Orang Tionghoa muslim tersebut adalah orang kaya sehingga orang tersebut dapat tinggal disana. Orang Tiongho non muslim yang tinggal di perumahan elit yang penghuninya sebagian besar adalah orang-orang Tionghoa tentunya tidak menghadapi tantangan seperti orang Tionghoa muslim yang harus tinggal bersama orang-orang etnis yang lain dimana mereka harus beaur dan beradaptasi dengan orang-orang disekitar mereka (Pasaribu, 2021). Kawasan Tionghoa Muslim yang masih berada di antara rumah masyarakat Tionghoa beragama Budha dan Kristen terletak di Jl. Pasundan dan Jl. Bukit Barisan Dalam (samping Lapangan Merdeka). Sedangkan masyarakat yang telah tinggal dan menetap di antara penduduk masyarakat pribumi di kota Medan terletak di Jl. Gaperta Ujung, Jl, Perumnas Helvetia, Jl. Mandala By. Pass.

Mereka yang telah berbaaur dengan masyarakat etnis lain di lingkungannya, walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam adat istiadat, tetapi kemudian mereka dapat menerima suatu kebersamaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Penjelasan di atas memberikan

bukti bahwa masyarakat Tionghoa yang dulunya berada kawasan yang terletak di kawasan pusat pasar, kini telah berkembang dan telah tersebar di beberapa daerah pusat kota bahkan jauh dengan pusat pasar yang pada dasarnya identik dengan masyarakat Tionghoa yang terkenal dengan kegigihannya dalam perdagangan. Mereka yang memilih bermukim dan berbaur dengan etnis lain memiliki alasan tersendiri, karena agar lebih mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain dan juga karena ikut serta dengan pasangan hidup mereka. (Amanda, 2016)

Masyarakat Tionghoa Medan baik yang tinggal di ruko maupun di kompleks pemukiman memiliki ciri khas yang sama yaitu jendela dan pintu yang dipasang jeruji besi dari lantai bawah hingga atas dengan rumah dikelilingi pagar tembok beton yang tinggi. Hal ini menimbulkan stereotip bahwa Tionghoa Medan sangat tertutup dan eksklusif. Etnis Tionghoa Medan memang membuat tempat tinggal mereka seolah-olah sebagai tempat perlindungan, yang dimana sebagian dari mereka masih memiliki trauma dengan peristiwa kerusuhan yang pernah menimpa mereka.

Kemudian secara umum masyarakat Tionghoa Medan adalah orang-orang yang percaya kepada hal-hal gaib atau takhayul. Bahkan kebanyakan dari mereka sangat bergantung dan menaruh keberuntungan mereka kepada hal-hal yang bersifat takhayul. Sifat mereka yang bergantung dan sangat percaya kepada takhayul disebabkan oleh faktor keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kepercayaan etnis Tionghoa Medan kepada hal-hal mistis tidak memandang umur, ataupun tingkat intelektualitas.

Dalam hal ini sebagai contoh, kita dapat melihat banyak masyarakat Tionghoa Medan yang menempel huruf-huruf yang dipercayai dapat membawa keberuntungan, memperlancar rezeki, ataupun membawa hal-hal positif lainnya, misalnya, huruf fuk-bahasa mandarin memiliki arti rezeki atau keberuntungan dalam rumah mereka. Dimana ada beberapa masyarakat Tionghoa Medan yang dengan sengaja menempelkannya di dinding rumah mereka secara terbalik dengan alasan supaya dapat dibaca oleh dewa-dewa yang ada di langit sehingga dewa-dewa akan mencurahkan rezeki ke rumah warga tersebut, selain huruf fuk ada juga huruf shi yang dimana memiliki arti kebahagiaan, dimana biasanya yang menempelkan huruf tersebut di pintu ataupun diletakkan diatas sesaji dimana biasanya pada perayaan ibadah atau pernikahan.

Di dalam rumah masyarakat Tionghoa Medan juga biasanya banyak terdapat ataupun banyak ditemukan lukisan kuda dan lukisan ikan, hal itu disebabkan masyarakat Tionghoa Medan percaya bahwa gambar lukisan kuda melambangkan arti kekuatan, dan gambar lukisan ikan melambangkan arti kemakmuran. Selain daripada kedua gambar tersebut adapun gambar yang sering ditemukan di dalam rumah masyarakat Tionghoa Medan adalah gambar lukisan naga yang dimana lukisan naga mereka anggap sebagai simbol orang Tionghoa. (Pasaribu, 2021)

Etnis Tionghoa Medan sampai sekarang masih mempertahankan kebudayaan-kebudayaan yang dari dulu mereka percayai dan mereka telah lakukan sampai sekarang. Kebudayaan yang terdapat di kalender lunar, seperti Cap Go Mei, Tang Chuan Festival, dan Cheng Beng. Akan tetapi masih banyak kebudayaan-kebudayaan lainnya dari etnis Tionghoa

Medan seperti, Secara umum Tionghoa Medan adalah orang-orang yang percaya kepada hal-hal gaib atau takhayul. Bahkan kebanyakan dari mereka sangat bergantung dan menaruh keberuntungan mereka kepada hal-hal yang bersifat takhayul. Sifat mereka yang bergantung dan sangat percaya kepada takhayul disebabkan oleh faktor keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. (Pasaribu, 2021)

Kebudayaan masyarakat Tionghoa Islam telah jauh berbeda dengan masyarakat Tionghoa yang lainnya. Tionghoa Islam tidak lagi melakukan tradisi-tradisi tersebut. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Tionghoa Islam yang telah meninggalkan tradisi yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Tionghoa. Namun mereka masih belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mereka lakukan, seperti membakar dupa, sembahyang pekong untuk hanya sekedar mengirimkan doa untuk saudara mereka yang telah meninggal. Dan pada saat hari raya Cina (Imlek), mereka tetap datang dan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh keluarga, guna untuk menghormati keluarga dan orang tua yang masih memeluk agama Budha, Kung Fu-Tse, Kao, dan Kristen. Mereka beranggapan bahwa, walaupun telah memeluk agama Islam tidak mungkin tali persaudaraan antara dengan saudara dan orang tua mereka lepas begitu saja, maka dari itu untuk menjaga silaturahmi, mereka tetap hadir dan merayakannya bersama-sama. (Amanda, 2016)

c. Bidang Pernikahan

Sama halnya dengan sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa yang masih beragama Budha. Masyarakat Tionghoa yang telah menjadi seorang Muslim juga memiliki sistem kekerabatan yang sama yaitu pernikahan, pantang pemilihan jodoh, mas kawin. Hanya saja sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa yang telah memeluk agama Islam lebih mudah karena mereka telah mempelajari agama Islam melalui Al Qur'an dan sesuai ajaran agama Islam.

Pernikahan adalah satu hal yang suci untuk mengikat dua orang yang saling menyayangi. Telah dijelaskan sebelumnya tentang cara-cara sebelum melakukan perkawinan/pernikahan. Perkawinan/pernikahan yang rumit, harus mahal, agung, dan upacara perkawinan/pernikahan sesuai dengan agama atau religi yang di anut, serta jodoh yang ditentukan oleh keluarga. Berbeda dengan ajaran agama Islam yang tidak mempersulit perkawinan/pernikahan umatnya. Hanya yang penting adalah seakidah, Baligh, dan sudah siap untuk menjalani kehidupan sesudahnya. Perkawinan masyarakat Tionghoa Islam tidak mahal, tidak rumit, dan jodoh ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena dirinya lah yang akan menjalani kehidupan. (Amanda, 2016)

Dalam hal menentukan partner atau rekan kerja dan juga calon menantu. Masyarakat Tionghoa Medan percaya kepada shio, atau tanggal lahir dimana jika kedua pasangan tidak memiliki kecocokan dalam hal tanggal lahir ataupun shio rencana pernikahan dapat dibatalkan. Di dalam menentukan hari pernikahan atau hari memulai sebuah usaha, masyarakat Tionghoa Medan percaya kepada hari dan bulan baik dimana hal itu sangat penting bagi mereka. Mereka akan berkonsultasi kepada ahlinya atau dapat melihat berdasarkan almanak untuk dapat melihat hari yang baik sehingga mereka bisa mendapatkan berkah. Bukan hanya dalam hal pernikahan

akan tetapi dalam hal pemakaman bagi mereka memakamkan seseorang yang sudah meninggal penting untuk melihat hari yang baik sehingga terkadang ada beberapa jenazah yang bahkan sampai berhari-hari disemayamkan di rumah duka atau balai sosial demi menunggu hari yang baik.

Di dalam kalender lunar ada masa chit guek pua (pertengahan bulan ketujuh) disebut sebagai bulan hantu dimana menurut kepercayaan mereka hantu-hantu dibebaskan atau dunia alam baka dibuka, sehingga dapat dipastikan pada waktu tersebut tidak akan ada yang mau menikah pada waktu tersebut, sebaliknya pada bulan kedelapan menurut almanak Tiongkok disebut sebagai waktu atau bulan yang baik sehingga pada waktu tersebut banyak orang yang menikah pada bulan tersebut karena dianggap bulan yang baik (Pasaribu, 2021). Banyak larangan dalam pemilihan jodoh masyarakat Tionghoa. Lain halnya dengan Tionghoa Islam yang keluarganya tidak memiliki pantangan dalam memilih jodoh yang kelak akan menjadi pasangan hidup. Muslim Tionghoa Medan tidak percaya lagi kepada aturan-aturan atau hal tersebut. Muslim Tionghoa dalam mencari pasangan yang penting atau yang utama adalah yang seiman.

Sama halnya dengan masyarakat Tionghoa beragamaa Budha, Tionghoa Islam juga memiliki mas kawin sebagai penghargaan dari keluarga pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan karena telah membesarkan calon pasangannya. Hanya saja perbedaannya terletak pada mas kawin atau yang biasa disebut hantaran. Sebelum melakukan acara pertunangan biasanya keluarga kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan hantaran yang akan diberi pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Perbedaan mas kawin antara Tionghoa yang masih beragama Budha dengan Tionghoa yang telah menjadi seorang Muslim adalah penyerahan seserahan yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa beragama Budha adalah dua kali yakni pada saat masih melakukan perundingan masalah pernikahan, dan satu hari sebelum acara pernikahan. Dan seserahan yang dilakukan oleh Tionghoa Islam hanya sekali pada saat hantaran saja dimana mas kawin hanya berupa uang, dan seperangkat alat sholat. (Amanda, 2016)

d. Bidang Keagamaan

Agama atau Kepercayaan merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Umumnya di wilayah kota Medan ada beberapa agama yang dominan yakni masyarakat yaitu agama Islam dan Kristen. Masyarakat etnis Tionghoa di kota Medan masih menganut kepercayaan Sinkretisme yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Mayoritas etnis Tionghoa masih berpegang teguh pada budaya yang berasal dari leluhur mereka. Hal tersebut masih terlihat dari kebiasaan etnis Tionghoa dalam mempersiapkan persembahan berupa sesajen untuk leluhurnya. Sesajen yang disiapkan berupa buah-buahan seperti apel, jeruk, air, dan juga berupa makanan. Hal tersebut dilakukan hampir pada setiap minggu dan juga kadang menabur bunga rampai sebagai ucapan syukur.

Pada masa Orde Baru 1966, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pada bidang agama, kepercayaan, dan adatistiadat kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 yang ditetapkan pada tanggal 6

Desember 1967. Kebijakan tersebut dikeluarkan atas dasar pemikiran bahwa agama kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa jika dilakukan di depan umum dapat mempengaruhi keadaan psikologis, mental dan moral yang kurang wajar terhadap masyarakat Indonesia, maka dari itu hal tersebut dapat menghambat berlangsungnya kebijakanasimilasi. Dalam peraturan tersebut, khususnya dalam bidang agama, etnis Tionghoa dilarang untuk melakukan atau menunaikan ibadah di tempat terbuka, artinya mereka hanya diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dalam lingkungan tertutup atau terbatas hanya pada lingkungan keluarga atau perorangan saja.

Pemerintah, misalnya, tidak mengizinkan pendirian tempat ibadah selain agama-agama resmi. Tempat ibadah pemeluk Khonghucu yang sudah terlanjur dibangun dianggap ilegal. Aturan ini juga diberlakukan terhadap agama-agama lokal yang masih banyak penganutnya di berbagai daerah. Sebagai ajaran yang tidak diakui, Khonghucu juga tidak boleh dicantumkan dikolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Hidayatullah, 2020). Inilah salah satu penyebab beralihnya pemeluk Khonghucu ke salah satu dari lima agama lain yang diakui secara resmi oleh negara demi keamanan dan kelangsungan masa depan mereka.

Terdapat banyak cara bagi komunitas Tionghoa untuk memutuskan menjadi muslim. Harus diakui ada pandangan yang mengatakan Islam dan Tionghoa merupakan dua kutub yang berlawanan. Padahal, setiap agama sejatinya bebas dipeluk komunitas Tionghoa. Tapi ketika pembicaraan mengarah pada Islam dan Tionghoa memang tidak terlepas dari perlakuan sejarah di masa lalu. Lebih spesifik, Junus Jahja menganggap bahwa strategi yang paling tepat untuk melakukan pembauran total dengan memeluk agama Islam. Islam merupakan faktor signifikan pembentuk identitas sosial golongan pribumi Indonesia. Dengan dapat diterima oleh golongan pemeluk Islam, diharapkan orang-orang Tionghoa di Indonesia dapat diterima oleh golongan pribumi, karena telah memiliki identitas sosial yang sama, yaitu sesama orang Islam.

Boleh dibilang bahwa sangat sulit bagi Tionghoa Muslim dalam mendapatkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Di masyarakat Indonesia sendiri terdapat stereotif ketika seorang Tionghoa memeluk agama Islam, Tionghoa kok Muslim. Belum lagi kenyataan di keluarga bahwa akan terjadi penolakan ketika seorang memutuskan memeluk agama Islam. Bahkan sampai pada tingkat tidak diakui sebagai anggota keluarga lagi. Perbincangan-perbincangan seperti itu masih banyak terjadi sampai sata ini. Dan puncak perdebatan itu akan berlanjut sampai pada titik boleh dan haruskan seorang Muslim merayakan tahun baru Imlek. (Pahrozi, 2018)

Dalam bidang agama, keturunan Tionghoa juga tidak lagi dapat didefinisikan semata-mata sebagai penganut Confusian, Taoisme, dan Budhisme. Agama-agama besar seperti Katolik, Protestan, dan Islam juga sudah mulai menduduki tempat penting. Pemeluk orang keturunan Tionghoa atas agama agama ini dapat dianggap sebagai sebuah penyimpangan kultural yang penting, sebab dalam gambaran agama Confusian klasik perbedaan kultural antara agama agama samawi dengan Confusionisme sangat besar. Menurut Max Weber, agama agama samawi Yahudi, Kristen (dan Islam) bersifat teosentrik, sedangkan Confusionisme bersifat kosmosentrik. Perbedaan konsep terdapat pengertian tentang Tuhan, tentang kesempurnaan manusia, dan tentang dosa. Dalam konsep Weber, Confusionisme tidak

mengenal Tuhan yang personal, tidak mengenal cita-cita kesempurnaan manusia dalam sistem kependetanaan, dan dosa adalah lebih sebagai penyesalan diri daripada sesuatu yang diancam oleh hukuman Tuhan. Perbedaan konsep keagamaan ini dikemukakan untuk menunjukkan betapa perubahan telah terjadi pada keturunan Tionghoa yang telah memeluk agama-agama samawi. Lebih dari itu, tentu di kalangan keturunan Tionghoa juga telah terjadi perubahan kultural dan sosial ketika mereka menganut agama-agama selain yang telah dimiliki secara tradisi. Mereka tidak lagi dikatakan sebagai subkultur yang terpisah dari umat agama-agama itu, dan juga bukan lagi sub masyarakat yang terlepas dari umat beragama lainnya. Agama-agama juga mempercepat proses pencairan masyarakat Tionghoa sebagai sub kultur dan sub masyarakat.

Jadi, faktor agama memang memainkan peranan penting dalam proses asimilasi (pembauran). Sebab kalau di Sulawesi (Manado), masa keturunan Tionghoa memeluk agama mayoritas di sana, yaitu Kristen, maka pembauran di sana tidak ada masalah lagi. Masalah Tionghoa di Thailand selesai, karena keturunan Tionghoa di sana memeluk agama mayoritas, yaitu Budha. Demikian juga di Philipina, mereka memeluk agama mayoritas Katolik dan juga tidak ada masalah Tionghoa di sana. Jadi kalau di Indonesia, keturunan Tionghoa dengan agama setempat akrab, maka ada kemungkinan selesainya masalah pri-nonpri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Islam memberi peluang dan kemungkinan yang cukup besar bagi orang Tionghoa juga bagi orang pribumi- untuk membangun dan mengenal lebih dekat dan akrab satu sama lain. Menjadi seorang muslim merupakan media yang lebih mudah untuk mempertemukan orang pribumi dengan orang Tionghoa, sebab dengan menjadi seorang muslim maka seseorang lebih terikat dalam satu keyakinan yang sama dan diikat dalam tali persaudaraan yang kokoh dan sejati. Prinsip persaudaraan antara sesama muslim tanpa membedakan latarbelakang, etnis, golongan dan status sosial yang ditanamkan Islam menjadi alasan kuat untuk menjalin persaudaraan antara sesama muslim. (Harahap, 2015)

Setelah rezim orde baru berakhir, kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Presiden Indonesia pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Selain itu disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan adanya Keppres ini, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dicabut dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya. Keputusan tersebut berlaku sejak 17 Januari 2000.

Banyak kebijakan pemerintah pasca reformasi yang mengakomodasi kepentingan umat Khonghucu dan etnis Tionghoa. Pada tahun 2001, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh pengganti Gus Dur yaitu Presiden Megawati dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tahun Baru Imlek pada 9 April 2002. Sejak saat itu warga keturunan Tionghoa bebas mengekspresikan kepercayaannya dan kebudayaannya yang selama Orde Baru dibungkam,

seperti larangan merayakan Imlek secara terbuka, hingga penerbitan tulisan berhuruf aksara Cina. Maka, pada 17 Februari 2002, Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek dapat digelar secara terbuka. (Hidayatullah, 2020)

e. Bidang pendidikan

Pada masa Orde Baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan yang menutup semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Pada tanggal 6 Juli 1966. Pada tahun berikutnya muncul Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Hal ini berdampak terhadap dilarangnya penggunaan aksara Tionghoa dalam bentuk penerbitan apapun, yang berlanjut dengan tindakan pemusnahan secara besar-besaran buku-buku berbahasa Mandarin. Puncaknya adalah penutupan lembaga-lembaga pendidikan Tionghoa.

Sekolah yang didirikan oleh Baperki seperti Ureca (Universitas Res Publica) diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diganti namanya menjadi Universitas Trisakti. Mahasiswa pribumi banyak yang masuk Universitas Trisakti, sehingga perimbangan jumlah mahasiswa pribumi menjadi lebih banyak dari pada mahasiswa Tionghoa peranakan itu sendiri. Contoh lain adalah sebuah universitas swasta kecil di Jakarta, yaitu Universitas Tarumanegara yang kemudian berkembang menjadi sebuah universitas yang cukup besar dan menampung banyak mahasiswa Tionghoa. Begitu juga beberapa universitas swasta di Surabaya, salah satu contohnya adalah Universitas Kristen Petra yang menerima banyak mahasiswa Tionghoa. (Hidayatullah, 2020)

Dalam bidang pendidikan, dimana dalam satu dasawarsa terakhir orang tua Tionghoa Medan semakin menyadari bahwa sangat penting yang namanya pendidikan. Bahkan orang tua Tionghoa Medan sampai mengirim anak-anaknya ke luar negeri. Negara Taiwan biasanya menjadi negara favorit bagi orang tua Tionghoa Medan untuk mengirim anaknya untuk belajar ke luar negeri, akan tetapi sekarang ini tempat untuk melanjutkan studi sudah mulai tersebar ke berbagai negara seperti, Amerika, Australia, dan Singapura. Negara Malaysia dan negara Tiongkok juga merupakan negara alternatif sebagai negara tujuan untuk melanjutkan studi dikarenakan biaya kuliah cukup memadai bagi keluarga yang ekonominya menengah. Orang tua Tionghoa Medan sadar bahwa mengirim anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikannya atau kuliah di luar negeri membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi mereka berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan karena sangat pentingnya bagi mereka pendidikan itu.

Mereka yang berangkat kesana biasanya ingin mempelajari dan menguasai lebih dalam mengenai bahasa mandarin. Orang tua Tionghoa Medan sangat menaruh perhatian di pendidikan khususnya di pendidikan bahasa asing, orang tua Tionghoa Medan menyadari betapa pentingnya penguasaan bahasa inggris. Orang tua Tionghoa Medan baik yang ekonominya rendah, menengah, ataupun tinggi biasanya mengirimkan anak-anak mereka ke tempat-tempat kursus bahasa inggris bahkan sampai ada yang menyewa jasa guru privat (Pasaribu, 2021). Oleh sebab itu di kota Medan banyak dijumpai tempat-tempat kursus bahasa

inggris baik itu yang berskala internasional yang tentunya dengan harga yang mahal sampai tempat-tempat kursus dengan harga yang terjangkau bagi yang menengah ke bawah.

Selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh Effendi Setiawan (2018:105) menyatakan bahwa orang tua Tionghoa Medan yang tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan studinya ke luar negeri biasanya perguruan tinggi lokal akan menjadi pilihan. Dalam beberapa tahun belakangan ini kesadaran Tionghoa Medan terhadap pendidikan membuat mereka banyak melakukan investasi di bidang ini. dalam waktu beberapa tahun, mereka mulai menguasai ataupun merebut pasar yang selama ini dikuasi perguruan tinggi swasta lama. Sekolah tinggi seperti STIE IIBI, Microskill, dan Unpri (Universitas Prima) dimana universitas-universitas tersebut setiap tahunnya dibanjiri oleh para mahasiswa yang ingin berkuliah di sana dan mayoritas etnis dari para mahasiswa tersebut adalah etnis Tionghoa, bahkan ada beberapa institut yang berafiliasi ke universitas luar negeri seperti, IT&B, dan PMCI, walaupun untuk dapat berkuliah disana dibutuhkan biaya yang banyak karena biaya kuliah yang tinggi akan tetapi institut-institut tersebut tidak kekurangan mahasiswa setiap tahunnya.

Bukan hanya di tingkat perguruan tinggi, akan tetapi ditingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan banyak orang tua Tionghoa Medan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah plus, dimana dalam keseharian di sekolah tersebut menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar mereka, seperti sekolah SIS (Singapore Internasional School), Piagett, Chandra Kusuma yang kini berganti nama menjadi Chandra Kumaladan Prime One, dimana sekolah-sekolah tersebut didominasi anak-anak Tionghoa. oleh sebab itu dalam beberapa waktu tahun mendatang generasi muda Tionghoa khususnya kaum terpelajar yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi akan bangkit. Fakta menunjukkan banyak pelajar sekolah lanjutan Tionghoa Medan yang berhasil menang dalam berbagai lomba tingkat internasional. pelajar-pelajar tersebut sebagian besar berasal dari Perguruan Sutomo, yang sudah sangat terkenal akan sekolah yang sangat berat dan serius terhadap para pelajarnya, dan sekolah dengan segudang ekstrakurikuler untuk menunjang bakat-bakat para siswanya. (Pasaribu, 2021)

Jika orang Tionghoa pada umumnya sangat menaruh perhatian atau menjunjung tinggi pendidikan anaknya, bahkan rela sampai menambah jam belajar anaknya melalui tempat-tempat kursus. Muslim Tionghoa juga sama dimana pendidikan untuk anak mereka sangat penting. Mereka rela bekerja keras demi anaknya mendapatkan pendidikan. mereka sangat sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Akan tetapi orang tua muslim Tionghoa dengan tingkat ekonomi menengah, sehingga dia tidak sanggup menyekolahkan anaknya sampai keluar negeri. Anak-anak muslim Tionghoa sebagian besar bersekolah di perguruan-perguruan swasta yang umum, dan ada juga disekolahkan di sekolah yang mayoritas Islam, hal itu memudahkan sang anak untuk dapat bergaul atau pun bersosialisasi dengan anak-anak muslim yang bukan etnis Tionghoa (Pasaribu, 2021). Jadi walaupun anak-anak muslim Tionghoa Medan tidak dapat bersekolah di sekolah yang plus atau elit atau tidak sampai mengirimkan anaknya ke tempat-tempat kursus, atau tidak sampai mendatangkan guru privat seperti yang anak-anak Tionghoa Medan non muslim lakukan karena keterbatasan ekonomi akan tetapi mereka seperti orang tua Tionghoa Medan yang menyadari betapa sangat pentingnya pendidikan itu. Mereka mengajarkan betapa pentingnya pendidikan itu dengan cara

yang berbeda-beda ada yang menanamkan untuk serius dan disiplin dalam belajar, ada orang tua yang membiasakan mandiri anaknya sejak kecil, itu semua dilakukan oleh orang tua muslim Tionghoa supaya anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan menggapai cita-citanya.

f. Bidang politik dan Keorganisasian

Dalam membentuk identitas politik, biasanya sebuah komunitas membentuk organisasi yang senantiasa siap menjadi wadah pemersatu. Organisasi ini menjadi wadah untuk saling mensupport dan berbagi pengalaman antar sesama. Keberadaan organisasi-organisasi etnis ini berefek pada munculnya rasa identitas bersama yang selanjutnya melahirkan perjuangan yang sama. Di antara organisasi tersebut antara lain Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) merupakan organisasi yang menghimpun secara keagamaan. Keberadaan organisasi ini bagian dari bentuk bahwa warga Tionghoa memiliki ragam agama yang berbeda.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) adalah sebuah organisasi yang anggotanya terdiri atas kalangan muslim keturunan Tionghoa. PITI merupakan gabungan antara Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM). PIT didirikan di Medan pada tahun 1935 oleh Liem Kie Tjie alias Abdoel Rasjid dan Mao Tse Fang alias Nurdin. PIT segera mengembangkan sayap ke Padang, Jakarta, Makassar, Madura, dan Banjarmasin. Jumlah anggotanya pada tahun 1942 sekitar 43.000 orang. Baru tiga puluh tahun kemudian PITI lahir pertama kali didirikan secara resmi pada tanggal 14 Juli 1961. Kegiatan prioritasnya adalah dakwah dan Syiar Islam. Dalam perkembangannya, saat Orde Baru berkuasa nama organisasi ini menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia, pernah juga berubah nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Saat ini PITI telah berkembang ke beberapa daerah di Indonesia diantaranya di kota Medan.

Dalam konteks politik, haji Abdul Karim Oei telah banyak memberikan kontribusi terhadap perjuangan dan perlawanan selama masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Keterlibatannya yang aktif sebagai kader Muhammadiyah telah menempatkannya menjadi mitra sang proklamator yang di segani oleh pendukungnya. Dimana saat itu, Belanda sempat (menggencarkan) politik adu domba (*Devide et impera*). Pasca kemerdekaan, kendatipun bias politik era Belanda memiliki dampak yang signifikan masa pasca kemerdekaan, namun, tidak sedikit dari kalangan tionghoa pada umumnya yang menjadi politisi dan aktif berpolitik. Sebagian diantara mereka menjabat di pemerintahan; Lee Kiat Teng alias Ali Mohammad adalah menteri kesehatan tahun 1953-1955; Tan Kiem Liong alias Haji Mohammad Hassa adalah menteri keuangan tahun 1964, dan seterusnya. (Farhan & Bakti, 2022)

Identitas etnis Tionghoa diakui baru mengalami keterbukaan secara penuh ke public sejak era reformasi. Keterlibatan warga Tionghoa merupakan wujud kebijakan pemerintah dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyatnya untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Pada kepemimpinan B.J.Habibi, lahir instruksi untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 26 tahun 1998. Penghentian ini istilah ini bertujuan untuk tidak lagi membeda-bedakan antara etnis berketurunan “cina” dan penduduk asli (pribumi Indonesia). Perbedaan yang ada cukup pada

wilayah etnisitas sebagai bagian dari keberagaman. Hal ini dibenarkan secara hukum dan secara sosiologis etnis keturunan 'Tionghoa' ini di tengah masyarakat Indonesia jangan lagi dipermasalahkan statusnya. Kebijakan pemerintah inipun turut berimplikasi secara politik kepada etnis Tionghoa baik secara nasional maupun lokal. (Karim, 2021)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN